

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD SEBAGAI ALAT
UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA UU OTONOMI
DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Magetan)**

SKRIPSI

Oleh :
WAHYUNINGSIH
NIM : 01220002



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
2006**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD SEBAGAI ALAT
UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA UU OTONOMI
DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri UIN Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

WAHYUNINGSIH
NIM: 01220002/ S-I



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
2006**

LEMBAR PERGESAHAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD SEBAGAI ALAT
UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA UU OTONOMI
DAERAH

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Oleh:

WAHYUNINGSIH

NIM: 01220002

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Di terima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 20 Juni 2006

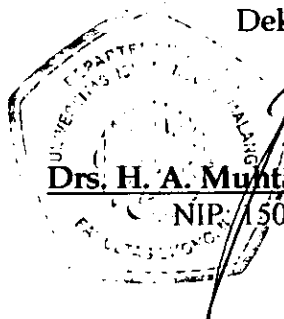
Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Drs.H.Muhammad Djakfar,SH, M.Ag.
NIP. 150 203 742
2. Sekretaris/ Pembimbing
Umrotul khasanah, M.Si.
NIP. 150 287 782
3. Penguji Utama
Slamet, SE, MM
NIP. 150 290 087

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:
Dekan;


Drs. H. A. Muhtadi Ridwan. MA
NIP. 150 231 828

LEMBAR PERGESAHAN
ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD SEBAGAI ALAT
UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA UU OTONOMI
DAERAH

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Magetan)

SKRIPSI

Oleh:

WAHYUNINGSIH

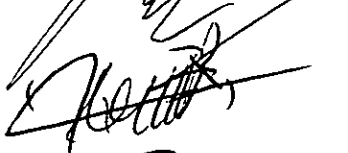
NIM: 01220002

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Di terima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 20 Juni 2006

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Drs.H.Muhammad Djakfar,SH, M.Ag.
NIP. 150 203 742
2. Sekretaris/ Pembimbing
Umrotul khasanah, M.Si.
NIP. 150 287 782
3. Penguji Utama
Slamet, SE, MM
NIP. 150 290 087

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:

Dekan;



MOTTO

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْعَدْلِ.....

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk kurun waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...."

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur senantiasa kehadiran ALLAH SWT, dengan semua nikmat dan karunia-Nya yang berlimpah tanpa batas, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan tidak ada halangan suatu apa pun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW, karena dengan kasih sayang beliaulah sampai sekarang kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, Islam, ihsan dan indahnya ukhuwah di bawah naungan dinul hak yakni dinul Islam.

Penulisan skripsi ini di maksudkan sebagai salah satu syarat kelulusan dari Universitas Islam Negeri Malang. Dalam penyelesaiannya, laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang terlibat dan berjasa untuk turut memperlancar proses penyelesaiannya, baik berupa bantuan moril maupun materiil. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak & Ibu yang tercinta yang dengan tulus ikhlas mengasuh, mendidik, membimbing, mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya serta kepercayaannya dan doanya sehingga bisa kuat dalam menjalani kehidupan ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
3. Bapak Drs. H. A. Muhtadi Ridwan, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.

4. Ibu Umrotul khasanah M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen UIN Malang, khususnya Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih demi masa depan penulis
6. Bapak Drs.H. Saleh Muljono,MM. Selaku Bupati Magetan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Ibu Mei Sugiartini, SH dan bapak subandi selaku kepala bagian keuangan dan kepala sub bagian anggaran pemerintah kabupaten Magetan yang telah memberikan izin, mengarahkan dan memudahkan dalam melakukan penelitian .

Tidak ada yang bisa penulis ungkapkan selain do'a semoga amal mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan dan kekurangan penulis. Oleh karenanya, saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon maghfiroh dan berserah diri. Semoga karya tulis ini memberikan manfaat kepada semua pihak. Amin.

Malang, 3 April 2006

Wahyuningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Manfaat Penelitian	7

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Penelitian terdahulu	9
B. Laporan keuangan sector publik.....	13
1. Pengertian laporan keuangan sektor publik.....	13
2. Fungsi laporan keuangan sektor publik.....	19
3. Tujuan laporan keuangan keuangan sektor publik.....	20
4. Karakteristik laporan keuangan keuangan sektor publik.....	23
5. Prinsip laporan keuangan keuangan sektor publik.....	25
6. Format laporan keuangan keuangan sektor publik.....	27
7. Keterbatasan laporan keuangan keuangan sektor publik.....	28
8. Perbedaan laporan keuangan sektor publik dan swasta.....	30
C. APBD.....	31
1. Pengertian APBD.....	31

2. Unsur-unsur APBD.....	32
D. Rasio Keuangan.....	32
1. pengertian rasio keuangan.....	32
2. Alat-alat rasio keuangan.....	33
3. Keterbatasan rasio keuangan.....	42
E. Kinerja Organisasi sektor publik	43
F Otonomi Daerah.....	45
1. Visi otonomi daerah.....	45
2. Tujuan otonomi daerah.....	47
3. Konsep otonomi daerah.....	47
4. pendapatan daerah otonom.....	48

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	50
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengambilan Data	51
E. Teknik Analisis Data.....	52

BAB IV: PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran pemerintah Kabupaten Magetan	
1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Magetan.....	56
2. Kondisi Geografi.....	59
3. Visi dan misi pemerintiah Kabupaten Magetan.....	61
4. Potensi penerimaan pendapatan pemerintah Kabupaten Magetan.....	62
B Pembahasan hasil penelitian	
1. Perhitungan penilaian kinerja pemerintah Kabupaten Magetan dengan analisis rasio keuangan.....	68
a. Rasio kemandirian	68
b. Rasio efektifitas.....	69
c. Rasio efisiensi.....	70
d. Rasio keserasian.....	72
e. Penyerapan dana pertriwulan.....	74
f. DSCR.....	77
g. Rasio pertumbuhan.....	78
2. Analisis data.....	80
a. Rasio kemandirian.....	80
b. rasio efektifitas.....	82
c. Rasio efisiensi.....	84
d. Rasio keserasian.....	86
e. Penyerapan dana pertriwulan.....	88

f. DSCR.....	91
g. Rasio kemandirian.....	93
3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magetan.....	95
4. Ditinjau dari sudut pandang Islam.....	98

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Pebedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu.....	12
Tabel	3.1	Standart pengukuran kinerja keuangan pemerintah.....	
Tabel	4.1	Potensi lahan jeruk.....	59
Tabel	4.2	Data luas permanent dan produksi.....	60
Tabel	4.3	Data penyamakan kulit.....	62
Tabel	4.4	Data kerajinan kulit.....	63
Tabel	4.5	Data kerajinan genteng.....	64
Tabel	4.6	Data lokasi pengembangan emping mlinjo.....	65
Tabel	4.7	Realisasi penyerapan dana APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2002-2004.....	72
Tabel	4.8	Rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2002-2004.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Contoh laporan perhitungan anggaran.....	28
Lampiran	2	Contoh laporan arus kas.....	28
Lampiran	3	Contoh laporan surplus-defisit.....	28
Lampiran	4	Contoh laporan ekuitas.....	28
Lampiran	5	Contoh laporan neraca.....	29
Lampiran	6	Data perkembangan APBD.....	66
Lampiran	7	Data biaya target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan DIPENDA Kabupaten Magetan.....	67
Lampiran	8	Perhitungan kemampuan dan batas maksimum pinjaman yang diperbolehkan bagi Kabupaten Magetan.....	74

ABSTRAK

Wahyuningsih, 2006 SKRIPSI, Judul : "Analisis Rasio Keuangan Pada APBD sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magetan Setelah Ditetapkannya UU Otonomi Daerah"

Pembimbing : Umrotul Khasanah, M, Si.

Kata Kunci : Analisis Rasio Keuangan, APBD, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan adanya UU Otonomi Daerah No.22 Tahun 1999, secara riil Daerah mendapat kewenangan untuk mengelola dirinya sendiri. Dengan kewenangan tersebut Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui Pemerintah Daerah telah menjalankan tugasnya dengan baik maka perlu, mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan, yang dituangkan pada APBD. Karena laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah dan juga salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Penelitian ini merupakan penelitian Diskriptif Kuantitatif yang tujuannya untuk mendiskripsikan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan selama periode tertentu. Analisis yang digunakan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah ini adalah Rasio keuangan. Yang terdiri dari (1) rasio kemandirian, (2) rasio efektifitas dan efisiensi, (3) rasio aktifitas, (4) DSCR, (5) rasio pertumbuhan.

Berdasarkan alat analisis yang digunakan maka diperoleh hasilnya dari tahun 2002, 2003 dan 2004 sebagai berikut: (1) Rasio Kemandirian sebesar 178.09%, 102.40%, dan 64.82%, semakin tinggi tingkat ketergantungannya pada pihak ekstern. (2) Rasio efektifitas sebesar 110, 1.08 dan 1.07 masih tergolong efektif karena diatas 1(satu), (3) rasio efisiensi sebesar 0.11, 0.12 dan 0.08, menunjukkan semakin efisien karena dibawah 1(satu). (4) rasio aktifitas yang terdiri dari rasio keserasian, untuk belanja rutin sebesar 70.71%, 74.69%, dan 76.89%, untuk belanja pembangunan sebesar 19.32, 23.60%, dan 16.43%, masih diprioritaskan pada belanja rutin, penyerapan dana pertriwulan, bahwa pemanfaatan dananya belum tergolong merata. (5) DSCR diperoleh hasil 20.36, 13.17 dan 25.83 bisa melakukan pinjaman karena DSCRnya diatas 2,5. (6) rasio pertumbuhan dari tahun 2002 sampai 2004 cenderung menurun

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setelah ditetapkannya UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan tonggak dimulainya otonomi daerah. Dengan UU ini maka secara riil daerah mendapat kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dirinya sendiri. Pemberian kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota, yang didasarkan kepada asas desentralisasi.

Dilakukannya desentralisasi, menurut Marium (1997:30) dalam bukunya Riant Nugroho (2000; 35) adalah demi tercapainya efektifitas pemerintahan dan demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grass roots democracy*), hal ini tidak jauh beda dengan apa yang dikemukakan oleh Hebert Simon, bahwa kata kunci dari otonomi adalah efesiensi pemerintahan secara keseluruhan (Nugroho,2000;37). Desentralisasi diwujudkan dalam otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta

kewenangan bidang lainnya, yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Halim, 2002: 185).

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang didaerah (Halim, 2002: 185). Dalam hal ini daerah memiliki hak untuk mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terkait dengan industri-industri daerah, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi (Halim, 2002:185). Dan tujuan dari pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Persatuan Republik Indonesia.

Jadi pada hakekatnya otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang besar kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pengelolaan sumber daya dan peningkatan penerimaan daerah. Maksudnya adalah agar daerah lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesempatan kerja.

Dengan adanya kewenangan otonomi kepada kabupaten dan kota, berarti pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokrasi, adil, merata dan berkesinambungan. Dan kewajiban ini, bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah jika daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim, 2002: 126).

Pasal 4 Peraturan Pemerintah NO. 105 Tahun 2000 Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dimana menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangannya tertuang dalam APBD. Berdasarkan PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak

ukur renstra (Ulum, 2004:42). Sehingga dari APBD akan tercermin secara langsung atau tidak langsung kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Karena pemerintahan daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDnya, agar dapat dinilai kinerja dari pemerintah daerah tersebut berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Sebagaimana dalam perusahaan untuk mengetahui kinerja perusahaan itu maka bisa melakukan dengan mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Begitu juga dengan pemerintahan daerah, juga bisa dilakukan dengan mengidentifikasi laporan keuangannya yang tertuang dalam APBD. Karena laporan keuangan dalam sektor publik merupakan komponen untuk menciptakan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas disini adalah suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ulum, 2004:40). Dalam hal ini terkait dengan aktivitas birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan juga salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, maka digunakan alat untuk menganalisisnya yaitu dengan rasio keuangan. Dimana rasio keuangan digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja keuangan dari segi kemandirian, efektifitas, efisiensi, aktivitas pemerintahan, kontribusi masing-masing pendapatan, dan pertumbuhan selama periode tertentu. Sedangkan APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, dimana menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan daerah dan penerimaan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran dalam periode tertentu.

Analisis rasio keuangan ini lebih sering digunakan pada perusahaan, untuk melihat posisi keuangan perusahaan, yang digunakan para investor sebagai dasar keputusannya. Seperti halnya perusahaan, pemerintahan daerah juga memiliki tujuan yang hampir sama tetapi bedanya pemerintahan tidak mementingkan profit oriented, tetapi bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Analisis rasio keuangan ini juga dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien dan akuntabel, maka dari itu pada kesempatan ini penulis akan melihat kinerja Keuangan dari Pemerintahan Kabupaten Magetan setelah adanya Otonomi Daerah, hal itu menunjukkan bahwa semakin luas dan besar bagi Kabupaten

Magetan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi Daerah yang dimiliki.

Dalam rangka mewujudkan Hal tersebut, maka Kabupaten Magetan memiliki program pembangunan prioritas antara lain meliputi bidang Industri, pertanian dan pariwisata. Berkaitan dengan itu, maka analisis ini untuk melihat Kabupaten Magetan telah melakukan tugasnya dengan baik atau tidak.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul: **"Analisis Rasio Keuangan pada APBD Sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Setelah Ditetapkannya UU Otonomi Daerah"**

B. RUMUSAN MASALAH

Mengacu pada kaidah akuntansi sektor publik yang berbeda dengan perusahaan swasta maka dalam analisis rasio keuangan dalam penelitian ini menggunakan Rasio kemandirian, Rasio efektivitas dan efisiensi, Rasio aktifitas, *Debt service coverage ratio* (DSCR), dan Rasio pertumbuhan. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magetan setelah ditetapkannya UU otonomi daerah, dilihat dari rasio keuangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dalam analisis rasio keuangan pada APBD yang menggunakan alatnya rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, *debt sevice coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan, dengan tujuan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

mendiskripsikan kinerja keuangan dari pemerintahan Kabupaten Magetan setelah ditetapkannya UU otonomi daerah, dilihat dari rasio keuangan.

D. BATASAN MASALAH

Berkaitan dengan luasnya pembahasan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis kuantitatif laporan keuangan selama periode 3 tahun yaitu tahun 2002 sampai dengan 2004 dengan alat analisis berupa rasio keuangan pada APBD. Dan pada penelitian ini, hanya dibatasi pada kinerja keuangannya.

E. MANFAAT PENELITIAN

Melihat dari tujuan penelitian ini, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pihak pemerintahan daerah

Dengan adanya penelitian ini, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan dan

mengambil keputusan baik yang terkait dengan masa sekarang atau masa yang akan datang.

2. Pihak lain

- a. Dengan penelitian ini bisa memberikan tambahan wacana dan informasi mengenai analisis rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja pada organisasi sektor publik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya dapat dipakai sebagai acuan.

BAB II KAJIAN TEORI

A. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian terdahulu diambil dari penelitian Enni Rohana 2004 dengan judul "Analisis Rasio Keuangan Bank dengan metode CAMEL untuk mengetahui kinerja PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk". Penelitian ini, mendiskripsikan kinerja dari PT. Bank Negara Indonesia, dengan metode CAMEL , untuk melihat kinerja dari Bank untuk tahun 2002 dan tahun 2003.

Teknik analisa yang gunakan Rasio permodalan, rasio kualitas, perhitungan manajemen, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas. Hasil analisis yang diperoleh adalah rasio permodalan mengalami kenaikan dimana tahun 2002 sebesar 16,44% dan tahun 2003 sebesar 19,07%, rasio kualitas mengalami kenaikan pada KAP I dimana tahun 2002 sebesar 4,33% dan pada tahun 2003 menjadi 4,58%, tetapi pada KAP II mengalami penurunan dimana tahun 2002 sebesar 171,63% dan pada tahun 2003 menjadi 169,28%.

Perhitungan manajemen menunjukkan kenaikan dimana tahun 2002 sebesar 82,32 kemudian pada tahun 2003 menjadi 87,31. Rasio rentabilitas, pada ROA mengalami penurunan pada tahun 2002 sebesar 1,99% dan pada tahun 2003 menjadi 0,77%, tetapi pada BOPO

mengalami kenaikan pada tahun 2002 sebesar 84,75% dan pada tahun 2003 menjadi 95,01%. Rasio likuiditas, pada cash ratio mengalami kenaikan, pada tahun 2002 sebesar 15,06% dan pada tahun 2003 menjadi 18,12%, dan pada LDR juga mengalami kenaikan, pada tahun 2002 sebesar 39,00% dan pada tahun 2003 menjadi 44,12%.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Diana Fitria 2004. Dengan judul "Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan rokok (studi kasus pada PT. Gudang Garam, Tbk dan PT. Hanjaya Mandala, Tbk)". Teknik analisa yang digunakan adalah rasio likuiditas yang meliputi current ratio dan cash ratio, rasio solvabilitas, net profit margin, gross profit margin, operating profit, return on investmen, return on equity, forning per share.

Hasil dari analisis yang dilakukan adalah rasio likuiditas, untuk current ratio, pada PT.Sampoerna nilai rata-ratanya 281,9% dan untuk PT.Gudang Garam nilainya 209,3% sedangkan cash ratio untuk PT.Sampoerna nilainya 42,56% dan untuk PT.Gudang Garam sebesar 5,84%. Rasio solvabilitas, untuk PT.Gudang Garam hanya menggunakan 39,95% dari dana pinjaman, sedangkan untuk PT. Sampoerna sebesar 5,84%.

Net Profit margin, pada PT Gudang garam sebesar 12,19% dan PT sampoerna sebesar 9,32%. Gross profit margin, untuk PT Gudang Garam sebesar 25,14% dan untuk PT Sampoerna sebesar 30,10%. Operating profit margin, untuk PT. Gudang Garam sebesar 19,04% dan pada PT. Sampoerna sebesar 19,12%. Return on investment, untuk PT. Gudang Garam sebesar 16,57% dan untuk PT.Sampoerna sebesar 13%. Return on equity, untuk PT.Gudang Garam sebesar 27,89% dan untuk PT.Sampoerna sebesar 27,21%. Earning per share, untuk PT.Gudang Garam sebesar Rp 1.112 dan untuk PT.Sampoerna sebesar Rp 267.

Tabel 2.1
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tempat	Teknik analisa
1	Enni Rohana (2004)	Analisis rasio keuangan BANK dengan metode CAMEL untuk mengetahui kinerja PT.Bank Negara Indonesia	Jln.merdeka Utara No.7 Malang	Rasio permodalan, rasio kualitas, perhitungan manajemen, rasio rentabilitas, dan rasio likuiditas.
2	Eka Diana fitria (2004)	Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan rokok (studi pada PT.Gudang garam,tbk dan PT.Hanjaya mandala,tbk)	Pojok BEJ brawijaya Malang	Rasio likuiditas, rasio solvabilitas, net profit margin, gross profit margin, operating profit, return on investmen, return on equity, dan farming per share
3	Wahyuningsih (2006)	Analisis rasio keuangan pada APBD sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah seteah ditetapkan UU otonomi daerah	Kantor pemerintah kabupaten magetan.Jln basuki rahmat timur I. Telp. (0351)894480, fax.894619	Rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, debt service coverage ratio (DCSR), dan rasio pertumbuhan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada judul, tempat penelitiannya dan teknik analisa yang digunakan.

B. LAPORAN KEUANGAN

1. Pengertian laporan keuangan sektor publik.

a. Laporan keuangan konvensional

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Zaki, 1996:17). Laporan keuangan merupakan catatan tertulis tentang suatu keuangan dari individu, asosiasi atau organisasi bisnis (Sahrul, 2000; 370).

Jadi laporan keuangan merupakan catatan transaksi-transaksi secara tertulis yang dilakukan oleh organisasi bisnis maupun publik selama tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Harahap (2001; 38), laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Laporan keuangan ini yang menjadi bahan informasi, bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.

Menurut Mardiasmo (2002; 159), Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Jadi laporan keuangan sektor publik merupakan catatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi, yang digunakan sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan, sebagai pertanggungjawaban, dan untuk menciptakan akuntabilitas.

Sehingga akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

b. Laporan Keuangan Menurut Syariah

Dalam islam sangat erat kaitannya dengan akuntansi, perlu diketahui bahwa pencatatan keuangan yang kita kenal sekarang ini diklaim berkembang dari peradapan Barat. Namun menurut sejarahnya kita mengetahui bahwa sistem pembukuan muncul di Italia pada abad ke-13.

Suatu pengkajian selintas terhadap sejarah islam menyatakan bahwa pencatatan keuangan dalam islam bukan lagi seni dan ilmu yang baru, bila dilihat dari peradapan islam yang pertama, islam sudah memiliki Baitul Maal yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai bendahara Negara serta menjamin kesejahteraan sosial (Harahap,2001:137).

Landasan akuntansi dalam islam terhadap dalam kitab suci Al-Qur'an surat AL Baqoroh ayat 282 yaitu :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ

بِالْمَعْدِلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.....

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk kurun waktu yang ditentukan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulisnya,...."
(Al Baqarah: 282)

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa islam mengajak umatnya untuk mencatat kegiatan bermuamalah yang tidak secara tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Ada 3 prinsip dalam operasional akuntansi islam, yang diambil dari Surat Al-Baqarah : 282 (Muhammad, 2002; 11) yaitu:

a. Prinsip Pertanggung jawaban.

Prinsip pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslimin, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dalam alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktek bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait, dan

biasanya dalam bentuk laporan akuntansi. Dimana terdapat dalam Surat Ibrahim ayat 41 yaitu:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (إبراهيم: ٤١).

Artinya:

"Ya tuhan ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang mukmin pada terjadinya hisab (kiamat)" (QS. Ibrahim:41)

b. Prinsip Keadilan.

Prinsip keadilan ini, merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai *inheren* melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu *pertama*, berkaitan dengan pratek moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. *Kedua*, Kata adil bersifat lebih fundamental (tetap berpijak pada nilai-nilai etika). Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Shaad : 26, yaitu:

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا الْحِسَابَ.

Artinya:

"...Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan meyesatkan kamu dari jalan Allah".

b. Prinsip kebenaran

Sebenarnya prinsip kebenaran tidak lepas dari keadilan karena dalam akuntansi selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Kebenaran dalam A-Qur'an tidak diperbolehkannya untuk dicampuradukan dengan kebathilan. Dalam Al-Qur'an terdapat dalam Surat Al-Baqarah : 24, yaitu :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ .

Artinya:

"Maka jika kamu tidak dapat membuat(nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat(nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir".

Pencatatan keuangan yang islami memiliki makna yang implisit bidang ekonomi, politik, dan agama yang menunjukkan kunci kearah pencatatan. Adapun sifat pencatatan keuangan dalam islam (widodo,2000:67) sebagai berikut:

1. Penentuan laba rugi yang tepat

Penentuan laba rugi bersifat subyektif dan bergantung niali, karena itu kehati-hatian harus dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana sesuai dengan syariah dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem pencatatan keuangan harus mampu memberikan standart berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijakan-kebijakan yang baik.

3. Ketaatan pada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu organisasi.

4. Keterikatan pada keadilan

Tujuan utama syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, karena itu informasi akuntan harus mampu melaporkan setiap kegiatan atau keputusan yang dibuat untuk menambiah ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan baik

Telah disepakati bahwa peranan perusahaan dianggap dari pendangan yang lebih luas pada dasarnya bertanggung jawab pada masyarakat secara keseluruhan. Nilai sosial ekonomi dari islam harus diikuti dan dianjurkan. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi yang terbaik untuk melaporkan hal itu.

6. Perubahan dalam pratek pencatatan keuangan

Peranan pencatatan keuangan yang demikian luas dalam kerangka islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam pratek

pencatatan keuangan tersebut harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran-saran yang tepat untuk mengikuti perubahan ini.

2. Fungsi laporan keuangan sektor publik.

Menurut Mardiasmo (2002; 161), secara umum fungsi laporan keuangan publik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.
- b. Digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- c. Digunakan untuk memonitor kinerja dan evaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
- d. Memungkinkan pihak luas untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima.
- e. Memungkinkan bagi mereka untuk menilai efiseusi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.
- f. Berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

- g. Berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat.
- h. Berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
- i. Memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

3. Tujuan laporan keuangan Sektor publik

Menurut Mardiasmo (2002; 163), secara rinci tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintahan.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintahan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan pengangguran serta untuk memprediksi pengaruh akuisisi dan alokasi sumber daya terhadap pencapaian tujuan operasional.

- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
- f. Untuk menentukan biaya program, fungsi dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintahan lain.
- g. Untuk mengevaluasi tingkat ekonomi dan efisiensi operasi, program, aktivitas dan fungsi tertentu di unit pemerintahan.
- h. Untuk mengevaluasi hasil suatu program, aktivitas. Dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
- i. Untuk mengevaluasi tingkat pemerataan (*equality*) dan keadilan (*equity*).

Dalam *Financial accounting standart board* (FASB 1990) mengeluarkan *statemen of financial accounting concepts No.4* (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (*objktives of financial reporting by nonbusiness organization*), tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan non bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.

2. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut.
3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
4. Memberikan informasi mengenai sumberdaya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dalam kepentingan sumber daya tersebut.
5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode, pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
6. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumberdaya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

7. Memberikan penjelasan dan interpretasi dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

4. Karakteristik laporan keuangan Sektor publik.

Karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Ulum, 2004: 185-187), sebagai berikut:

a. Relevan

Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan harus:

1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*).

Informasi harus memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*).

Informasi harus dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3) Tepat waktu

Informasi harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4) Lengkap.

Informasi akuntansi keuangan pemerintahan harus disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

b. Andal.

Informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

1) Penyajian jujur.

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (*verifiability*).

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda jauh.

3) Netralitas.

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan.

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pemerintahan lain pada umumnya

d. Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

5. Prinsip laporan keuangan Sektor publik.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standart dalam penyusunan standart akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan palaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna dalam memahami laporan keuangan yang disajikan (Ulum, 2004; 187-191) yaitu sebagai berikut:

a. Basis akuntansi.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas.

b. Prinsip nilai perolehan (*Historical cost principle*).

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Dimana kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

c. Prinsip realisasi (*Realization principle*).

Pendapatan yang tersedia yang telah diotoritaskan melalui anggaran pemerintahan selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*Substance over form principle*).

Dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

e. Prinsip Periodisitas (*periodicity principle*).

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi (*consistency principle*).

Bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full disclosure principle*).

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

h. Prinsip penyajian wajar (*Fair presentation principle*).

Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga asset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

6. Format laporan keuangan Sektor publik.

a. Laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan anggaran.

Laporan perhitungan anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBD

diawal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD diakhir periode. Contohnya dapat dilihat pada lampiran 1.

b. laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Contohnya dapat dilihat pada lampiran 2

c. Laporan kinerja keuangan/*surplus-Defisit*

Laporan surplus-defisit adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas (pemerintah daerah) dalam satu periode akuntansi. Contohnya dapat dilihat pada lampiran 3.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Contohnya dapat dilihat pada lampiran 3.

e. Laporan posisi keuangan/*Neraca*

laporan neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (pemerintah daerah) pada suatu titik tertentu. Contohnya dapat dilihat pada lampiran 4.

7. Keterbatasan Laporan keuangan Sektor publik.

Menurut Halim (2002; 126), menyebutkan beberapa keterbatasan laporan keuangan sektor publik yaitu sebagai berikut:

- a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan lembaga perusahaan yang bersifat komersial.
- b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan perimbangan *incremental budget* yaitu besarnya masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatnya sejumlah presentasi tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Oleh karena disusun dengan pendekatan secara *incremental* maka sering kali mengabaikan bagaimana resiko keuangan dalam APBD.
- c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, lebih ditekankan pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD-nya.

8. Perbedaan laporan keuangan Sektor publik dengan sektor swasta

Perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dengan laporan keuangan sektor swasta adalah sebagai berikut:

- a. laporan keuangan sektor publik.
 - 1) Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas
 - 2) Berfokus pada bagian organisasi
 - 3) Melihat ke masa depan secara detail

- 4) Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan
 - 5) Laporan diperiksa oleh treasury
 - 6) Cash accounting
- b. Laporan keuangan sektor swasta
- 1) Sebagian besar kinerja secara finansial pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor
 - 2) Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
 - 3) Tidak dapat melihat masa depan secara detail
 - 4) Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standart akuntansi, pasar modal, dan praktek akuntansi.
 - 5) Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
 - 6) Accrual accounting

C. APBD

1. Pengertian APBD

Menurut mamesah, bahwa berdasarkan pasal 64 ayat 2 UU No.5 tahun 1997, APBD adalah sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana disitu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna menbiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Halim,2002;16).

Menurut Wajong, APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financieel werplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legeslatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutupi pengeluaran tadi (Halim, 2002:19).

Jadi APBD adalah rencana operasional keuangan pemerintah yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan kepada badan legeslatif, sebagai pertimbangan DPRD dalam memberikan kredit kepada daerah, yang akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan dan menjadi dasar penetapan anggaran.

2. Unsur-unsur APBD

Dari definisi diatas menunjukkan bahwa suatu anggaran daerah, termasuk APBD memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.

- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yaitu biasanya 1(satu) tahun.

D. RASIO KEUANGAN

1. Pengertian Rasio keuangan

Menurut Soedoyono (1991:50), rasio keuangan adalah angka yang menunjukkan perbandingan yang sama, itulah yang disebut dengan rasio keuangan. Angka banding keuangan, rasio finansial, angka banding finansial, yang semua merupakan peng-Indonesiaan istilah finansial rasio.

Menurut Riyanto (1992:252-253), rasio keuangan adalah ukuran atau "*yardstick*" yang digunakan dalam interpretasi dan analisa laporan keuangan finansial suatu perusahaan. Pengertian rasio itu sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam "*aritmatika terms*" yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data finansial.

Menurut Harahap (2001:297), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti.

Jadi analisis rasio keuangan merupakan teknik yang digunakan untuk mengetahui keuangan dan kinerja perusahaan baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang.

2. Alat-alat rasio keuangan

Pada dasarnya macam rasio keuangan itu banyak sekali. Tetapi rasio yang ada pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Golongan pertama adalah berdasarkan sumber data dan golongan yang kedua adalah berdasar tujuan dari penganalisa.

Menurut Munawir (1999; 68-69), berdasarkan sumber datanya maka angka rasio dapat dibedakan menjadi:

- a. Rasio Neraca (*balance sheet ratio*) yang tergolong dalam kategori ini adalah semua rasio yang datanya diambil dari neraca misalnya: *current ratio, acid test ratio*.
- b. Rasio laporan laba/rugi (*income statement ratio*) yaitu angka-angka rasio yang dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan laba/rugi. misalnya: *gross margin, net operating margin, operating ratio dan sebagainya*.
- c. Ratio-ratio antar laporan (*interstatement ratio*) adalah semua angka rasio yang penyusunan datanya berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari laporan laba/rugi. misalnya *sales to inventory, sales to fixed assets* dan seterusnya.

Penggolongan angka rasio yang berdasarkan pada sumber datanya sebenarnya kurang bermanfaat sebab yang penting bukan darimana data itu diperoleh tapi kesimpulan apa yang dapat diperoleh dari angka rasio tersebut.

Sedangkan menurut Riyanto (1992:254), rasio keuangan dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur likuiditas perusahaan (*current ratio, acid test ratio*).
- 2) Ratio leverage yaitu rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar efektifitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya (*inventory turn over, overage collection period dll*).
- 3) Ratio probabilitas yaitu yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan (*profit margin on sales, return on total assets dsb*).

Rasio-rasio keuangan tersebut sudah sering diterapkan dalam perusahaan. Adapun dalam penelitian ini merupakan analisis rasio pada sektor publik, dalam hal ini pemerintah daerah yaitu pada APBDnya. Walaupun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Tetapi analisis ini harus dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntanbel (Halim, 2002:127).

Maka dari itu analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD (Halim, 2002: 128-135) antara lain sebagai berikut:

a. Rasio kemandirian keuangan daerah.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Dimana semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan bila semakin rendah rasio ini berarti tingkat ketergantungannya terhadap pihak ekstern semakin tinggi. Dikatakan mandiri, jika 100% dari pendapatan asli daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, dan pembangunan. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah.

b. Rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

1) Rasio efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektifitas apabila rasio yang dicapai diatas 1 (satu) atau diatas 100%. Namun jika semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

2) Rasio efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}$$

Rasio ini dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1(satu) atau kurang dari 100%. Namun semakin kecil rasio efisiensi

berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik. Namun keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan tidak memiliki arti jika ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima.

c. Rasio aktivitas

1) Rasio keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, dan jika semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase untuk belanja pembangunan yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi cenderung semakin besar.

Kelemahan dari rasio keserasian ini, belum adanya standart yang pasti berapa persen idealnya untuk belanja rutin dan berapa persen idealnya untuk belanja pembangunan.

Namun sebagai Daerah di Negara berkembang peranan Pemerintah Daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Walaupun belum ada patokan yang pasti, jika hasil

perhitungan rasio ini, rata-rata 80% pendapatan daerah digunakan untuk belanja rutin dan 20% digunakan untuk belanja pembangunan, berarti bahwa daerah tersebut masih memprioritaskan pendapatannya untuk mencukupi belanja rutin.

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

2) Penyerapan dana per triwulan

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara periodik atas kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing triwulan. Jadi apabila realisasi penerimaan pendapatan per triwulan dikurangi realisasi pengeluaran per triwulan terjadi surplus dan sementara penyerapan dana untuk pengeluaran terbesar terjadi pada periode triwulan terakhir berarti kinerjanya lamban dan pelaksanaan pembangunan terpusat pada triwulan terakhir.

Jika dana terpusat pada triwulan terakhir maka memberikan indikasi untuk pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya lainnya pada

masing-masing periode triwulan tidak efektif, karena dana yang tersedia sejak triwulan pertama kurang dimanfaatkan secara efektif. Tetapi jika pada dana untuk triwulan pertama sebagai persiapan dan pelaksanaan *survey desaigh* sekitar 5%-10%, menunjukkan untuk masing-masing triwulan telah efektif, terlebih lagi apabila indikasi tersebut terjadi pada belanja pembangunan untuk proyek fisik dimana semestinya pada periode triwulan terakhir merupakan tahap *finishing* dan masa pemeliharaan proyek.

d. *Debt servis coverage rasio* (DSCR)

DSCR merupakan sumber pelengkap untuk mempercepat proses pembangunan Daerah, yang bersifat jangka panjang. Dengan menggunakan dua ukuran yaitu:

1) *Debt Service Rasio* (DSR)

Merupakan ambang batas kemampuan pelunasan hutang yang pada prinsipnya digunakan Pemerintah Daerah untuk mengendalikan jumlah pinjaman yang relatif aman.

2) *Debt Coverage Rasio* (DCR)

Pada prinsipnya merupakan angka perbandingan antara perkiraan kemampuan keuangan Daerah yang dapat disisihkan (tabungan netto) dengan total rencana pembayaran pinjaman setiap tahunnya.

Adapun formula yang digunakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Halim, 2002;106) sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman)}}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BD : Bagian Daerah yang terdiri dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam (SDA).

DAU : Dana Alokasi Umum

BW : Belanja Wajib/Rutin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, pasal 6 Persyaratan pinjaman daerah yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- 1) Jumlah komulatif pokok pinjaman Daerah yang wajib dibayar (PPWD = pokok pinjaman wajib dibayar) tidak melebihi 75% (tujuh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- 2) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman *Debt service coverage ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (Dua koma lima).

Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
 - a. Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
 - b. Pinjaman jangka pendek untuk pengeturan arus kas.
2. ketentuan yang menyangkut prosedur
 - a. Mendapat persetujuan DPRD
 - b. Dituangkan dalam kontrak.
- e. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintahan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber Pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Data yang dimasukkan dalam rasio pertumbuhan ini adalah pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Rumus yang digunakan (Halim, 2002;135) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Jumlah tahun sesudahnya} - \text{jumlah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Dikatakan pertumbuhan yang semakin baik, jika pertumbuhan yang terjadi semakin naik dari tahun ke tahun

3. Keterbatasan rasio keuangan

Menurut Weston (1985; 65), walaupun rasio keuangan adalah alat yang sangat berguna tetapi juga mempunyai keterbatasan dan harus digunakan secara hati-hati. Rasio tersebut disusun dari data akuntansi, sedangkan data akuntansi dipengaruhi oleh penafsiran yang berbeda. Jadi bila rasio dua buah perusahaan akan dibandingkan maka data akuntansi yang digunakan sebagai dasar berpijak perlu dianalisa lebih dahulu perbedaan-perbedaan yang lebih besar yang harus dicocokkan.

Secara umum keterbatasan rasio keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Jika rasio dua buah perusahaan dibandingkan maka diperlukan analisis atas data akuntansi atas data akuntansi dasar yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan rasio dan mengadakan rekonsiliasi atas berbagai perbedaan-perbedaan pokok.
- b. Rasio harus digunakan secara bijaksana dan hati-hati, bukan digunakan tanpa berpikir dan dibuat secara mekanisme.
- c. Rasio keuangan bukan jawaban tangkap dari pertanyaan tentang prestasi prestasi suatu perusahaan
- d. Rasio keuangan atas perusahaan harus dikaitkan dengan trend-trend dalam faktor strategi dan ekonomi yang memberi pengaruh yang besar pada perusahaan selama beberapa waktu.

E. KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Dimana akuntabilitas bukan hanya menunjukkan kemampuan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi menunjukkan uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Ulum, 2004: 275).

Menurut Ulum, (2004:276) bahwa pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintahan, dimana dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan perbuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Adapun tujuan dari pengukuran kinerja sektor publik ini adalah (Ulum, 2004:277), sebagai berikut:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*Top down dan bottom up*).

2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Adapun manfaat dari penilaian kinerja sektor publik ini adalah

(Ulum, 2004;277) sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*Reward dan Punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

F. OTONOMI DAERAH

Salah satu ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan tersebut merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Ulum, 2004;43).

1. Visi Otonomi Daerah

Dalam hal ini dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya (Syaukani, 2002;172) yaitu sebagai berikut:

a. Bidang politik

Bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola karier politik dan administrative yang kompetitif, serta mengembangkan sistem manajemen pemerintah yang efektif.

b. Bidang Ekonomi

Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya, diharapkan akan membawa masyarakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu.

c. Bidang Sosial

Dengan adanya otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni social dan saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dari kegiatan otonomi daerah (Syaukani, 2002;172) yaitu sebagai berikut:

- a. Satu pihak membebaskan pemerintah pusat dari beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global.
- b. Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah pusat mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.
- c. Dengan otonomi daerah maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan.
- d. Dengan otonomi daerah maka kemampuan prakarsa dan kreatifitas mereka akan terpacu sehingga kapabilitasnya dalam mengatasi berbagai masalah domestik akan semakin kuat.

3. Konsep Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No 22 Tahun 1999 merangkum hal-hal sebagai berikut (Syaukani, 2002 ; 175):

- a. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah.
- b. Penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan kepada daerah.
- c. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur setempat demi menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan yang berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula.

- d. Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi dan institusi yang dimiliki agar lebih sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang telah didesentralisasikan setara dengan beban tugas yang dipikul selaras dengan kondisi daerah serta lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
- e. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah serta pengaturan yang lebih jelas atas sumber-sumber pendapatan negara dan daerah, pembagian pendapatan dari sumber penerimaan yang berkaitan dengan kekayaan alam, pajak dan retribusi serta tata cara dan syarat untuk pinjaman dan obligasi daerah.
- f. Perwujudan desentralisasi fiskal melalui pembesaran alokasi subsidi dari pemerintah pusat yang bersifat *block grant*, pengawasan kepada daerah untuk menetapkan prioritas pembangunan, serta optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya pembangunan yang ada.
- g. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang bersifat kondusif terhadap upaya memelihara harmoni social sebagai bangsa.

4. Pendapatan Daerah Otonom

Untuk menjamin sumber keuangan bagi daerah otonomi, pemerintah harus menjamin perimbangan keuangan pusat dengan

daerah, perimbangan ini dapat ditempuh melalui salah satu dari dua metode (Ulum, 2004;51) sebagai berikut:

- a. Perimbangan keuangan yang ditempuh dengan cara penetapan persentase tertentu bagi daerah otonom dari penerimaan pusat. Hal ini diadopsi dalam UU No. 25 Tahun 1999 Tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD). UU PKPD membedakan dana perimbangan menjadi tiga kategori (Ulum, 2004; 51) yaitu:
 1. Bagian/persentase tertentu yang diterima daerah otonom dari sejumlah pajak pusat dan penerimaan pusat (misalnya PBB, Bea balik nama pemilikan tanah, penerimaan kehutanan, penerimaan perikanan, penerimaan pertambangan umum).
 2. Alokasi umum (*Bock grant*) sebesar 25% dari APBN yang diberikan kepada daerah otonom berdasarkan sejumlah indikator seperti luas wilayah, jumlah penduduk dan indikator kualitas hidup manusia.
 3. Alokasi khusus (*spesific grant*) yang penggunaannya sudah ditentukan oleh pusat dalam APBN.

BAB III METODE PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN

Lokasi yang diambil untuk penelitian ini adalah kantor Pemerintahan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Jln. Basuki Rahmat Timur I. Telp. (0351)894480, Fax. 894619.

B. JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sebagaimana yang disebutkan oleh Umar (2001:37), penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang mendasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh dan akurat. Menurut Singarimbun (1998:9) upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang akan diteliti terdapat usaha untuk menambahkan informasi kualitatif pada data kuantitatif.

Adapun penelitian Deskriptif menurut Arikunto (1998:329), adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jadi penelitian deskriptif kuantitatif adalah mengadakan kegiatan pengumpulan data, analisa data, dan interpretasi data yang bertujuan untuk membuat deskriptif mengenai kejadian yang terjadi pada saat penelitian.

C. SUMBER DATA

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah di sediakan oleh pihak ketiga atau tidak berasal dari sumber langsung atau dengan kata lain data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, dan sebagainya sehingga lebih informatif (umar, 2002:84). Sumber data pada penelitian ini berupa laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, yang telah di dokumentasikan bagian keuangan Pemerintahan Kabupaten Magetan.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan dua teknik yaitu:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel atau dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 1998:236). Dalam penelitian ini mengambil dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan majalah yang berhubungan dengan pemerintah Kabupaten Magetan. Khususnya laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan tahun

2002 sampai dengan 2004, yang telah dibuat oleh Bagian keuangan Pemerintahan Kabupaten Magetan.

2. Interview

Interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari pewawancara (Arikunto, 1991:126). Jadi interview adalah teknik pengumpulan data dengan Tanya jawab secara lisan dengan pihak bagian keuangan guna mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Dalam hal ini dilakukan dengan kepala sub bagian anggaran dan sub bagian pembukuan pada bagian keuangan pemerintah Kabupaten Magetan.

E. TEKNIK ANALISA DATA

Analisa dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Dan berdasarkan kaidah akuntansi pada APBD berbeda dengan perusahaan swasta, maka data yang telah terkumpul dianalisis dan diolah dengan menggunakan alat analisa rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktifitas, debt service coverage ratio (DSCR), dan rasio pertumbuhan (Halim, 2002:227):

1. Rasio kemandirian.

Dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman}}$$

2. Rasio efektifitas dan efisiensi

a. Rasio efektifitas

Dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah}}$$

b. Rasio efisiensi

Dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}$$

4. Rasio aktivitas

a. Rasio keserasian

Dengan menggunakan alat analisis sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

b. Penyerapan dana per wulan

Dengan menggunakan alat dengan melihat laporan per triwulan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai laporan kepada DPRD

5. *Debt service coverage ratio (DSCR).*

Dengan menggunakan alat perhitungan sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman)}}$$

6. Rasio pertumbuhan

Dengan alat perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Jumlah tahun sesudahnya} - \text{jumlah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Standart Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah

No	Rasio	Formula	Standart
1	Kemandirian	<100% >100%	▪ Mandiri ▪ Belum mandiri
2	efektifitas	<100% >100%	▪ Efektif ▪ Tidak efektif
3	efisien	>100% <100%	▪ Semakin efisien ▪ Semakin tidak efisien
4	Keserasian	<50% >50%	▪ Dalam memicu pelaksanaan pembangunan relatif besar ▪ Dalam memicu pelaksanaan pembangunan relatif kecil
5	Penyerapan dana pertriwulan	Triwulan I <10% Triwulan I >10%	▪ Dikatakan belum merata/ belum efektif ▪ Dikatakan sudah merata/ efektif
6	DSCR	<2,5 >2,5	▪ Mampu melunasi hutangnya ▪ Tidak mampu melunasi hutangnya
8	pertumbuhan	Diatas Nol Dibawah Nol	▪ Pertumbuhan yang baik ▪ Pertumbuhan yang lamban

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. GAMBARAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

1. Sejarah Pemerintah Kabupaten Magetan

Awal dari terbentuknya Kabupaten Magetan dari peristiwa yang sangat penting. Ketika wafatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645, yang merupakan tonggak sejarah mulai surutnya kerajaan Mataram. Dan pada tahun 1946 Sultan Amangkurat I mengadakan perjanjian dengan VOC sehingga memperkuat pertahanan dari serangan Mataram sekaligus memberikan keleluasaan pada VOC ke Mataram.

Peristiwa tersebut menjadikan Sultan Amangkurat I dipandang sebelah mata dikalangan keraton, termasuk putranya sendiri yaitu Adipati Anom yang bergelar Sultan Amangkurat II. Peristiwa tersebut membuat Pangeran Giri, yang saat itu sangat berpengaruh di Daerah pesisir Utara Pulau Jawa mulai bersiap-siap melepaskan diri dari kekuasaan Mataram. Pada tahun 1674 adanya pemberontakan yang dilakukan Pangeran Trunojoyo terhadap Mataram, yang merupakan keponakan dari Pangeran Cokronigrat II.

Pada saat itu juga didalam keraton Mataram adanya kesalah pahaman antara Basah Gondokusumo dan Patih Mataram yang bernama

Nrong Kusumo, yang dituduh bersekutu dengan para ulama yang berposisi dan menentang kebijaksanaan Sultan Amangkurat I. Akhirnya Basah Gondokusumo diasingkan ke Gedong Kuning Semarang selama 40 hari ditempat kediaman kakek beliau yang bernama Basah Suryaningrat. Sedangkan Patih Nrong Kusumo meletakkan jabatannya dan kemudian pergi pertapa kedaerah sebelah Timur Gunung Lawu. Dan jabatannya digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Nrong Boyo II.

Dalam pengasingan Basah Gondokusumo mendapat nasehat dari kakeknya, untuk menyingkir kedaerah sebelah Timur Gunung Lawu. Karena pada saat itu, daerah Gunung Lawu diadakan babat hutan, yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Ki Buyut Suro, yang kemudian bergelar Ki Ageng Getas. Pelaksanaan babad hutan ini, atas dasar perintah Ki Ageng Mageti sebagai cikal bakal daerah tersebut.

Untuk mendapatkan sebidang tanah untuk bermukim disebelah Timur Gunung Lawu tersebut, maka Basah Suryaningrat dan Basah Gondokusumo menemui Ki Ageng-Mageti dikediamannya yaitu diDukuh Gandong Kidul (Gandong Selatan). Hasil dari pertemuan itu Basah Suryaningrat diberi tanah disebelah Utara Sungai Gandong, tepatnya di desa Tambran. Tetapi setelah mengetahui bahwa Basah Suryaningrat masih kerabat keraton maka sebagai bukti kesetiaannya terhadap Mataram, Ki Ageng Mageti mempersembahkan seluruh tanah miliknya.

Setelah Basah Suryaningrat menerima tanah dari Ki Ageng Mageti, sekaligus beliau mewisuda cucunya yaitu Basah Gondokusumo menjadi penguasa ditempat tersebut dengan gelar Yosonegoro, yang kemudian dikenal sebagai Bupati Yosonegoro, pada tanggal 12 Oktober Tahun 1675.

Sedangkan Ki Ageng Mageti setelah wafat dimakamkan di Desa Magetan, yang sekarang menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Magetan. Dan kediamannya telah mengalami pemugaran pada masa bupati Djajadi dan diberi nama Surya Graha. Terletak pada kelurahan Magetan.

Sejak dikeluarkannya UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, sejak saat itu pula sebenarnya Pemerintah pusat memberikan kewenangan secara luas kepada setiap daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Akan tetapi mengingat setiap daerah diIndonesia ini, memiliki kondisi Geografis yang tidak sama maka dalam melaksanakannya otonomi daerah, masing-masing daerah tentu saja berbeda-beda.

Ada Daerah yang sudah menerapkan otonomi secara keseluruhan atau murni, tetapi ada daerah yang belum secara murni menerapkan otonomi daerah. Seperti pemerintah Kabupaten Magetan ini, yang juga belum bisa menerapkan secara murni otonomi daerahnya, namun dengan kondisi geografis yang sangat berpotensi untuk diolah dan dikembangkan

maka Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten Magetan untuk mengelola sendiri sumber daya yang ada.

Dan berdasarkan UU No.12 Tahun 1950 Tentang pembentukan daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (lembaran Negara tahun 1950 Nomor 19, tambahan lembaran negara No.9). Maka dibentuklah pemerintah Kabupaten Magetan. Dan dibentuknya bagian keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

2. Kondisi Geografi

a. Letak dan batas daerah

Magetan merupakan salah satu kabupaten diujung Barat Propinsi Jawa Timur, berada dikaki Gunung Lawu dengan ketinggian diatas permukaan air laut 660 1360 dpl, terletak 7°38'30" lintang selatan dan 111°20'30" Bujur Timur. Dengan batas administratif sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Madiun.
- 3) Sebelah selatan : Kabupaten ponorogo dan Kabupaten Wonogiri
(Jawa Tengah).
- 4) Sebelah barat: Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah).

b. Luas dan Tipe Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten 680.85Km, terbagi dalam 16 Kecamatan dan 235 desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk sekitar 685.000 jiwa. Bila dilihat dari tingkat kesuburannya dapat dibagi dalam 6 tipologi wilayah yaitu sebagai berikut:

- 1) Wilayah pegunungan subur (Kecamatan Plaosan).
- 2) Wilayah pegunungan sedang (Kecamatan panekan dan sebagian Kecamatan Poncol)
- 3) Wilayah pegunungan kurang subur (sebagian Kecamatan Poncol dan kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, dan sebagian Kecamatan Kawedenan).
- 4) Wilayah dataran rendah subur (kecamatan Karangmojo, kecamatan Takeran dan kecamatan karangrejo).
- 5) Wilayah dataran rendah sedang (kecamatan maospati, Kecamatan Magetan, sebagian kecamatan Sukomoro, sebagian Kecamatan Bendo dan sebagian Kecamatan kawedenan).
- 6) Wilayah dataran rendah kurang subur (sebagian Kecamatan bendo dan sebagian Kecamatan Sukomoro).

c. Suhu dan curah hujan

Suhu udara berkisar antara 16°20°C di Daerah pegunungan dan 22°26°C di dataran rendah. Curah hujan rata-rata 2500-3000 mm didataran

tinggi, sedangkan didataran rendah rata-rata 1300-1600 mm. Potensi yang dimiliki dibidang pertanian dan pariwisata.

3. Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Magetan

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Magetan sesuai dengan jati dirinya yaitu berakhlak mulia, mandiri, dinamis, demokratis, dan berkeadilan.

b. Misi

- 1) peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 2) Mengembangkan perekonomian Daerah dengan pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
- 3) Mewujudkan SDM yang professional dan meningkatkan sarana dan peraturan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan Otonomi daerah.
- 5) Mewujudkan suasana aman dan damai melalui kepastian penegakan dan perlindungan hukum.

4. Potensi Penerimaan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Magetan

a. Bidang Pertanian

Secara umum bidang pertanian ini meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan unggulannya pada:

1) Pertanian

Potensi yang dikembangkan dalam pertanian ini adalah ; Sayur-sayuran, unggulannya pada kentang, granala, wortel dan kol serta komoditas lainnya yaitu bawang merah/putih, sawi, tomat, buncis, lombok dan terong. Produksi pertahun 50.225 Tons, tingkat produksifitas 72,28 kw/Ha, luas lahan permanen 5.125 Ha.

2) Perkebunan

a. Tanaman Jeruk Pamelo

Pengembangantanaman buah jeruk pamelo ini, berlokasi di 4 wilayah Kecamatan Bendo, Takeran, Sukomoro, dan Kewadenan yang dikenal dengan sebutan "BETASUKA". Variasi produk dari buah jeruk ini adalah manisan, karmilo (kurma pamelo), bahan baku manisan kulit jeruk pamelo yang diproses di wilayah pengembangan di Kecamatan Sukomoro.

Table 4.1
Potensi Lahan Jeruk

Lokasi	Potensi (Ha)	LahanPertanian (Ha)	Rencana Pengembangan
Bando	500	310.68	189.32
Sukomoro	400	244	156
Takeran	400	248	152
Kawedenan	454	185	269
Jumlah	1,754	987,68	766,32

Sumber data : Buku profil pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2002-2004

b. Tanaman Kopi

Tanaman kopi jenis Arabika, dikembangkan di wilayah kecamatan Poncol dan Panekan.

Tabel 4.2
Data luas permanen dan produksi

Lokasi	Luas area (Ha)	Produksi (Kw)
Poncol	412	524
Parang	8	31,2
Magetan	7	22,2
Plaosan	134	274,5
Panekan	123	139,5
Jumlah	684	991,6

Sumber data : Buku profil pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2002-2004

3) Peternakan

program pengembangan bidang peternakan diarahkan pada upaya pengembangan. Ternak sapi di 3 wilayah Kecamatan yang dikenal dengan 3p (Kec. Plaosan, Poncol, dan Panekan).

4) Perikanan

Pada sektor ini, sedang dibudidayakan ikan hias maupun ikan sebagai konsumsi masyarakat, yang dilaksanakan oleh Dinas peternakan maupun pemuda melalui karang taruna sebagai bentuk usaha mandiri.

Dalam rangka pemasyarakatan budidaya pada sektor ini, Pemerintahan kabupaten Magetan memiliki 2 (dua) tempat pembudidayaan perikanan di kecamatan palosan dan Sukomoro, disamping pembudidayaan di telaga wahyu dengan jenis ikan adalah nila dan ikan tombro serta lele.

b. Bidang Pariwisata (SA).

Obyek wisata yang merupakan asset Pemerintahan Kabupaten magetan cukup banyak , satu diantaranya merupakan andalan yaitu:

1) Telaga Sarangan

Merupakan obyek wisata alam yang terletak di Gunung lawu yang didukung dengan obyek wisata alam lainnya yaitu air terjun tirtosari, puncak lawu, camping ground mojosari, telaga wahyu, air terjun watu ondo, pundak kiwo, jarakan dan bayumas yang semua obyek ini berada disekitar obyek wisata sarangan.

2) Labuh Sejati

Merupakan wisata budaya tahunan, dilaksanakan setiap hari Jum'at pon bulan ruwah bertempat ditelaga pasir sarangan. Ritual budaya ini dilaksanakan oleh masyarakat sarangan dan sekitarnya sebagai ungkapan syukur atas keselamatan dan kesejahteraan yang diterima dari Tuhan Yang Maha Esa.

3) Puncak lawu

Panorama puncak lawu menjelang matahari terbit berada diketinggian kurang lebih 3.654m dpl dengan suhu udara antara 8°sampai 12° C dengan lama perjalanan sekitar 8 jam dari cemara sewu. Gunung lawu merupakan gunung terbesar di Pulau jawa, banyak dikunjungi pada bulan suro/Muharam.

c. Bidang Industri

Pada sektor ini, diprioritaskan pada pengembangan industri kecil yang terbesit agro, dititik beratkan pada kegiatan Home Industri dengan produk unggulan berupa:

1) Penyamakan dan Kerajinan Kulit

Dipusatkan dilingkungan Industri kecil (LIK) dan desa Mojopurno, merupakan bahan baku pembuatan sepatu, sandal, ikat pinggang, tas donipet, jaket kulit dll, dengan berbahan baku kulit, dengan sentral industri (show room) dan penjualan di jl. Sawo kelurahan selosari Magetan.

Sebagai industri rumah tangga, maka usaha ini menyebar pada beberapa desa/kelurahan di kecamatan Magetan dengan pusat kegiatan kelurahan Selosari dan Desa Mojopurna Kecamatan Ngariboyo.

Tabel 4.3
Data penyamakan kulit

Lokasi	Unit usaha	Tenaga Kerja	Vol Produksi	Nilai Prod	Nilai bahan	Nilai Tambh
Lik	40	312	576.000	32.400	19.440	12.960
Luar						
Lik	135	608	486.375	11.070	6.592	4.478
Jumlah	175	920	1.062.375	43.470	214.2000	17.438

Sumber Data:: Buku profil Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2002-2004

Table 4.4
Data kerajinan Kulit

Lokasi	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Vol prod	Nilai Prod	Nilai Bahan	Niali tambah
Lik Luar	—	—	—	—	—	—
Lik	138	415	306.981	17.515,4	9.524,4	8.010,8
Jumlah	138	415	306.981	17.515,2	9.524,4	8.010,8

Sumber Data:: Buku profil Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2002-2004

2) Kerajinan Anyaman Bambu

Kerajinan anyaman bambu di Kabupaten Magetan sangat didukung oleh bahan baku berupa pohon bambu yang banyak tumbuh di wilayah Kabupaten Magetan. Industri ini berpusat di Desa Renginagung Kecamatan Magetan. Jenis produk berupa: tempat Koran/majalah, tempat tissue, tempat sampah, vas bunga, kap lampu dan berbagai hiasan dinding merupakan kerajinan kreasi baru. Sedangkan produk klasik berupa alat keperluan dapur antara lain : besek, kepang/gedek dan capil, yang berbahan baku bambu. Adapun lokasi di kecamatan Magetan, Palosan, Panekan, Poncol, Takeran dan Parang.

3) Makanan Olahan

Jenis makanan yang menjadi khas Magetan adalah jenang candi, emping mlinjo, manisan karmilo, tape, lempeng (krupuk uli), krupuk rambak dll.

4) Gamelan (Alat Musik Tradisional)

Industri gamelan di Magetan merupakan produk dari tradisi turun temurun, pada sentra industri ini terdapat 9 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja kurang lebih 54 orang, nilai investasi Rp 45 juta sedang nilai produksi Rp 1,6 Milyar. Rata-rata produksi pertahun 20 set pelog slendro dengan pusat pengembangan di Desa Kauman Kecamatan Karangrejo.

5) Kerajinan Genteng

Genteng merupakan bahan bangunan yang produksinya menyebar di beberapa desa dan kelurahan diseluruh wilayah kecamatan sekabupaten Magetan. Sebagai unit usaha rumah tangga dengan teknologi yang masih sederhana, pengembangan kerajinan genteng ini cukup banyak menyerap tenaga kerja dari 1.611 unit usaha menampung tenaga kerja sebanyak 5.166 orang dengan nilai produksi kurang lebih Rp 34 juta.

Tabel 4.5
Data Kerajinan Genteng

Kecamatan	Desa	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi
Maospati	Gulun	355	1.663	7.668.000
	Tanjung spreh	361	1.081	7.797.600
	Kembangan	56	166	1.209.600
Sukonoro	Tinap	17	59	367.200
	Bibis	20	65	432.000
	Borejo	224	413	4.838.400
Barat	Jeruk	24	87	518.400
	Karangsono	99	296	2.138.400
	Panggung	50	196	1.080.000
	Manjung	45	161	972.000
Bendo	Dukuh	95	287	2.052.000
	Kleco	15	52	324.000
	Tulung	24	70	518.000
Kawedenan	Kawedenan	77	154	1.663.200

Sumber Data:: Buku profil Pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2002-2004

6) Emping Mlinjo

Mlinjo merupakan bahan baku emping merupakan salah satu komoditi pertanian di Kabupaten Magetan, dikembangkannya tanaman mlinjo ini dimaksudkan agar petani terdorong untuk memanfaatkan lahannya lebih intensif karena tanaman ini menurut agroklimatnya dan peluang pasarnya sangat terbuka.

Tabel 4.6
Data Lokasi Pengembangan Emping Mlinjo

Lokasi	Unit usaha	Tenaga kerja	Nilai produksi
Purmosari	192	420	7.560.000
Baron	20	45	828.000
Tambak rejo	12	24	432.000
Bandar	53	118	2.124.000
Jumlah	277	607	10.944.000

Sumber Data:: Buku profil pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahun 2002-2004

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Perhitungan Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dengan Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.

Dikatakan telah mandiri jika 100% dari pendapatan asli daerah telah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dengan melihat perkembangan APBD Kabupaten

Magetan tahun anggaran 2002 sampai 2004 (dapat dilihat pada lampiran 5), dapat dihitung rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Bantuan pemerintah pusat/propinsi dan pinjaman}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Kemandirian Tahun 2002} &= \frac{20.036.894.890,05}{11.250.942.892,72} \\ &= 178,09\% \\ \text{Rasio Kemandirian Tahun 2003} &= \frac{25.828.075.338,20}{25.221.656.774,43} \\ &= 102,40\% \\ \text{Rasio Kemandirian Tahun 2004} &= \frac{24.202.190.320,03}{37.334.118.973,06} \\ &= 64,82\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio kemandirian menunjukkan adanya penurunan, dari tahun 2002 sampai tahun 2004. Indikasi tersebut dipengaruhi oleh kecilnya pendapatan asli daerah dan besarnya jumlah bantuan pihak pemerintah dan pinjaman.

b. Rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah

1) Rasio efektifitas

Rasio efektifitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio ini dikatakan efektif jika rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau minimal 100%. Dengan melihat biaya, target dan realisasi

penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan DIPENDA Kabupaten Magetan tahun anggaran 2003 dan 2004 (dilihat pada lampiran

6) dapat dihitung rasio efektifitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil Daerah}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektifitas tahun 2002} &= \frac{6.931.535.199,13}{6.280.777.000,00} \\ &= 1,10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektifitas tahun 2003} &= \frac{8.381.264.806,28}{7.724.500.000,00} \\ &= 1,08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efektifitas tahun 2004} &= \frac{28.927.111.681,89}{26.812.896.000,00} \\ &= 1,07 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efektifitas dari tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan adanya penurunan, Indikasi tersebut dipengaruhi adanya naiknya realisasi penerimaan pendapatan dan besarnya target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

2) Rasio efisiensi

Rasio efisiensi menunjukkan kinerja dari pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan. Dengan membandingkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rasio efisiensi ini dikatakan efisien bila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang 100%. Dengan melihat biaya, target, dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan DIPENDA Kabupaten Magetan tahun anggaran 2002 sampai 2004 (dilihat pada lampiran 6), dapat dihitung rasio efisiensi sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{realisasi penerimaan pendapatan asli daerah}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio efisiensi tahun 2002} &= \frac{768.080.517,10}{6.931.535.199,13} \\ &= 0,11 \\ \text{Rasio efisiensi tahun 2003} &= \frac{1.005.747.784,29}{8.381.264.806,28} \\ &= 0,12 \\ \text{Rasio efisiensi tahun 2004} &= \frac{2.383.974.672,82}{28.927.111.681,89} \\ &= 0,08 \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio efisiensi dari tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan kinerja semakin baik. Walaupun ada kenaikan pada tahun 2003 sebesar 0,01, indikasi kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Namun pada tahun 2004 adanya penurunan sebesar 0,04, indikasi penurunan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah realisasi penerimaan PAD.

c. Rasio aktivitas

Rasio aktivitas ini, untuk melihat kegiatan pemerintah daerah yang berhubungan dengan alokasi dana yang tersedia, dalam hal ini ada dua rasio yaitu:

1) Rasio keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Tetapi dalam hal ini, belum ada patokan yang pasti, berapa persen untuk belanja rutin dan berapa persen untuk belanja pembangunan, tetapi jika rata-rata 80% dari pendapatan digunakan untuk belanja rutin dan 20% dari pendapatannya digunakan untuk belanja pembangunan, berarti pendapatan di daerah tersebut masih diprioritaskan untuk mencapai kebutuhan belanja rutin.

Kelemahan dari rasio keserasian ini, belum adanya standart yang pasti berapa berapa persen idealnya untuk belanja rutin dan berapa persen idealnya untuk belanja pembangunan.

Namun sebagai daerah yang berada di Negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk memicu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Dengan melihat dari perkembangan APBD Kabupaten Magetan tahun anggaran 2002 sampai 2004 (dilihat pada lampiran 5), dapat dihitung rasio keserasian sebagai berikut:

$$\text{Rasio belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja rutin}}{\text{total APBD}}$$

$$\text{Rasio belanja pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{total belanja pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin tahun 2002} &= \frac{214.386.983.490,61}{303.167.666.934,12} \\ &= 70,71\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Belanja Pembangunan tahun 2002} &= \frac{58.569.042.286,00}{303.167.666.934,12} \\ &= 19,32\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin tahun 2003} &= \frac{257.201.213.015,51}{344.349.311.078,41} \\ &= 74,69\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja pembangunan tahun 2003} &= \frac{81.262.564.768,00}{344.349.311.078,00} \\ &= 23,60\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja rutin tahun 2004} &= \frac{263.379.962.636,09}{342.530.534.043,77} \\ &= 76,89\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio belanja pembangunan tahun 2004} &= \frac{43.270.636.194,00}{342.530.534.043,77} \\ &= 16,43\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan rasio keserasian untuk untuk belanja rutin dari tahun 2002 sampai 2004 adanya kenaikan yaitu 70,71%,74,69%,76,89%.

Indikasi tersebut dipengaruhi oleh adanya kenaikan pada total belanja rutin. Pada belanja pembangunan dari tahun 2002 sampai 2004 adanya kecenderungan menurun, walaupun adanya kenaikan ditahun 2003 sebesar 4,72%, indikasi kenaikan tersebut dipengaruhi oleh besarnya total belanja pembangunan dan besar pula total APBDnya. Namun ditahun 2004 adanya penurunan sebesar 7,17%, indikasi penurunannya

dipengaruhi oleh kecilnya total belanja pembangunan dan besarnya total APBD.

2) penyerapan dana pertriwulan

Berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulanan. Penyerapan dana pertriwulan ini, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara periodik atas kegiatan yang direncanakan pada masing-masing triwulan. Dalam hal ini dikatakan efektif bila pada triwulan pertama untuk biaya persiapan dan pelaksanaan *survey desaigh* sekitar 5% sampai dengan 10% dari anggaran pendapatan, dan apabila indikasi tersebut terjadi pada belanja pembangunan untuk proyek fisik, yang mana semestinya pada triwulan terakhir merupakan tahap finishing dan masa pemeliharaan proyek

Dalam analisis ini, karena keterbatasan data yang diperoleh, peneliti hanya bisa mendapat data untuk tahun 2004, sehingga untuk tahun 2002 dan 2003 tidak bisa dianalisis. Untuk itu peneliti hanya menganalisis laporan penyerapan dana pertriwulan untuk tahun 2004. Dan untuk tahun 2002 dan 2003, diharapkan setidaknya analisis untuk tahun 2004 sudah mewakilinya.

Tabel 4.7
Realisasi Penyerapan dana APBD Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2004

N o	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Anggaran pendapatan				
2	Belanja rutin	271.463.137.406,00			
3	Belanja pembangunan	44.387.461.375,00			
	Jumlah	315.840.598.781,00			
1	Realisasi penerimaan sisalebih tahun lalu		16.702.197.664,91		
2	Realisasi penerimaan APBD	4.498.468.935,22	11.696.480.113,22	5.892.485.782,65	6.613.224.424,99
3	Realisasi penerimaan BAP/BHBP	1.055.055.195,00	5.777.889.584,00	7.478.864.310,00	9.778.464.375,00
4	Realisasi penerimaan SDO	2.964.217.392,00	4.997.098.004,00	4.478.974.041,00	5.433.039.069,00
5	Realisasi penerimaan DAU&DAK	84.378.332.000,00	147.662.081.000,00	67.231.749.000,00	44.821.170.000,00
6	Realisasi penerimaan pendapatan	93.605.724.122,22	188.429.807.569,22	84.752.244.265,65	70.314.509.700,99
7	Realisasi penerimaan pendapatan kumulatif	93.605.724.122,22	282.035.531.691,44	366.787.775.957,09	437.102.285.658,08
8	Persentase realisasi pendapatan	28,38	57,13	25,70	21,32
9	% Realisasi pendapatan kumulatif	28,38	85,51	111,21	1325,30
1	Realisasi belanja rutin&pembangunan	74.507.086.700,42	165.867.685.357,64	67.209.560.314,64	72.573.353.157,81
2	Realisasi belanja rutin&pembangunan kumulatif	74.507.086.700,42	240.374.771.058,06	307.584.331.372,70	380.157.645.530,51

N o	Keterangan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3	% Penyerapan belanja rutin & pembangunan	57,32	107,43	37,71	47,35
4	% Kumulatif penyerapan belanja rutin & pembangunan	57,32	164,75	202,46	249,81
1	Realisasi belanja rutin	58.656.569.900,42	141.282.082.115,64	59.276.043.394,64	62.821.837.125,81
2	Realisasi belanja rutin kumulatif	58.656.569.900,42	199.938.652.016,06	259.214.695.410,70	322.036.532.536,51
3	% Penyerapan belanja rutin	21,61	52,04	21,84	23,14
4	% Kumulatif penyerapan belanja rutin	21,61	73,65	95,49	118,63
1	Realisasi belanja pembangunan	15.850.516.800,00	24.585.603.242,00	7.933.516.920,00	10.751.516.032,00
2	% Penyerapan belanja pembangunan	35,71	55,39	17,87	24,22
3	% Kumulatif penyerapan belanja pembangunan	35,71	91,10	108,97	133,19

Sumber Data: APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2002-2004

Dari tabel penyerapan dana APBD diatas untuk tahun 2004 menunjukkan adanya kinerja yang kurang efektif. Indikasi tersebut dipengaruhi oleh adanya dana yang dialokasikan pada triwulan pertama lebih dari 10%, adanya defisit setiap triwulannya ketika realisasi pendapatan per triwulan dikurangi realisasi pengeluaran per triwulan.. Karena dikatakan efektif jika masing triwulan sudah tidak adanya surplus dan defisit.

d. *Debt service coverage ratio (DSCR)*

DSCR digunakan untuk mengetahui besar pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai sumber dana lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah komulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75% dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
2. Minimal DSCR 2,5

Dengan melihat perhitungan *debt service coverage ratio* tahun anggaran 2002 sampai 2004 (dilihat pada lampiran 7), dapat dihitung DSCRnya sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (pokok angsuran + bunga + biaya pinjaman)}}$$

$$\begin{aligned} DSCR \text{ Tahun 2002} &= \frac{256.993.005.473,47 - 214.570.246.336,91}{20.832.526.194,68} \\ &= \frac{42.421.859.136,56}{20.832.526.194,68} \\ &= 20,36 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Maksimal angsuran pokok pinjaman} &= 686.374.657,65 / DSCR \text{ minimal yaitu } 2,5 \\ &= 121.488.314,20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR Tahun 2003} &= \frac{289.309.124.409,20 - 257.451.213.934,50}{24.190.578.709,84} \\
 &= \frac{31.856.910.574,70}{24.190.578.709,84} \\
 &= 13,17 \\
 \text{Maksimal angsuran pokok pinjaman} &= 646.035.817,43 / \text{DSCR minimal yaitu } 2,5 \\
 &= 114.348.339,70 \\
 \text{DSCR Tahun 2004} &= \frac{300.372.408.589,89 - 263.379.962.636,09}{18.190.000.986,27} \\
 &= \frac{46.994.446.953,77}{18.190.000.986,27} \\
 &= 25,83 \\
 \text{Maksimal angsuran pokok pinjaman} &= 799.966.027,06 / \text{DSCR minimal yaitu } 2,5 \\
 &= 141.159.398,80
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan DSCR menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magetan dari tahun 2002 sampai tahun 2004 bisa melakukan dan mengembalikan pinjaman. Hal itu ditunjukkan dengan hasil DSCR yang lebih dari 2,5 dan pinjaman yang dilakukan kurang dari 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

e. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dikatakan memiliki pertumbuhan yang semakin baik, jika pertumbuhan yang terjadi semakin naik dari tahun ketahun.

Adapun perhitungan dalam rasio pertumbuhan ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Jumlah tahun sesudahnya} - \text{jumlah tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 4.8
Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Magetan
Tahun Anggaran 2002-2004

No	Keterangan	2002	2003	2004
1	PAD	20.036.894.890,05	25.828.075.338,20	24.202.190.320,86
2	Pertumbuhan PAD	-	28,90%	(6,29%)
3	Total pendapatan	298.507.854.435,12	355.405.976.367,41	343.496.561.535,86
4	Pertumbuhan pendapatan	-	19,16%	(3,35%)
5	Belanja rutin	214.570.246.336,91	257.451.213.934,50	263.379.962.636,09
6	Pertumbuhan belanja rutin	-	19,98%	2,30%
7	Belanja pembangunan	58.569.042.286,00	81.252.564.768,00	43.270.636.194,00
8	Pertumbuhan belanja pembangunan	-	38,73%	(46,74%)

Sumber Data: APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2002-2004 (Data diolah)

Dari perhitungan rasio pertumbuhan dari tahun 2002 sampai tahun 2004 menunjukkan, pada pertumbuhan komponen PAD adanya penurunan dan bahkan cenderung negatif. Indikasi penurunan pertumbuhan PAD dipengaruhi oleh menurunnya masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Pada pertumbuhan komponen total pendapatan juga adanya penurunan, indikasi penurunan pertumbuhan total pendapatan dipengaruhi oleh kecilnya penerimaan pada komponen

PAD. Pada pertumbuhan komponen belanja rutin menunjukkan adanya penurunan, indikasi penurunan pertumbuhan belanja rutin dipengaruhi oleh besarnya belanja rutin ditahun 2002. Dan pada pertumbuhan komponen belanja pembangunan adanya kecenderungan untuk semakin menurun, indikasi semakin menurunnya pertumbuhan belanja pembangunan dipengaruhi oleh semakin tingginya komponen belanja rutin.

2. Analisis data

a. Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2002:128), Kemandirian keuangan suatu daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Dimana, semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan Daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, Tetapi bila rasio kemandirian semakin kecil mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan Daerah terhadap pihak ekstern semakin tinggi. Dikatakan mandiri, jika 100% dari pendapatannya mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil dari perhitungan Rasio kemandirian pada pemerintahan Kabupaten Magetan menunjukkan adanya kecenderungan untuk menurun. Terlihat pada tahun 2002 sebesar 178,09%, menunjukkan bahwa ditahun 2002 tingkat ketergantungan terhadap pihak ekstern masih rendah, dikarenakan pada tahun ini pendapatan asli daerahnya masih mencukupi untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Pada tahun 2003 sebesar 102,40% menunjukkan bahwa ditahun 2003 adanya penurunan sebesar 75,69%, artinya bahwa pada tahun 2003 pemerintah Kabupaten Magetan adanya penurunan pada pendapatan asli daerah sehingga menyebabkan kenaikan tingkat ketergantungan terhadap pihak ekstern. Namun sebenarnya pendapatan asli daerah masih dikatakan mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya karena masih diatas 100% (seratus persen).

Dan pada tahun 2004 sebesar 64,82% menunjukan bahwa pada tahun 2004 mengalami penurunan yang dratis yaitu sebesar 37,58%. Artinya bahwa pada tahun 2004 pemerintah Kabupaten Magetan tingkat ketergantungannya pada pihak ekstern semakin naik atau semakin besar, dikarenakan pendapatan asli daerahnya adanya kecenderungan semakin turun, sehingga semakin tidak mencukupi untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya.

Jadi kemandirian pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2002 dan tahun 2003 masih dikatakan mandiri, karena ditunjukkan dengan hasil yang diatas 100% yaitu 178,09% dan 102,40%. Namun ditahun 2004 dikatakan belum mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, karena ditunjukan hasil yang dibawah 100%.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Magetan perlu adanya usaha untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana ekstern, dengan melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai oleh pusat atau propinsi.

b. Rasio efektifitas dan efisiensi

1) Rasio efektifitas

Menurut Ulum (2004;294), Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Halim (2002;129), dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai diatas 1 (satu) atau diatas 100%. Namun semakin tinggi rasio ini, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Hasil perhitungan rasio efektifitas, dari tahun 2002, 2003, dan 2004 pada pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan adanya kecenderungan untuk turun. Terlihat pada tahun 2002 sebesar 1,10 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 pemerintah Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugasnya tergolong efektif, karena masih diatas 1 (satu) atau diatas 100%. Pada tahun 2003 sebesar 1,08 menunjukkan adanya penurunan sebesar 0,02. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya jumlah realisasi penerimaan asli daerah dan besarnya target penerimaan PAD yang ditetapkan, Namun ditahun 2003 ini, pemerintah Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugasnya masih tergolong efektif, karena masih diatas 1 (satu) atau diatas 100%.

Dan pada tahun 2004 sebesar 1,07 menunjukan adanya penurunan sebesar 0,01. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh besarnya target penerimaan PAD yang ditetapkan, namun ditahun 2004 Pemerintah Kabupaten Magetan juga masih dikatakan efektif, karena masih diatas 1 (satu) atau diatas 100%.

Jadi pemerintah Kabupaten Magetan dalam menjalankan tugasnya dari tahun 2002 sampai 2004 bisa dikatakan tergolong efektif karena masih diatas 1 (satu) atau 100%. Namun terlihat adanya kecenderungan untuk semakin turun. Hal itu menggambarkan bahwa realisasi dari penerimaan PAD kecil dan besarnya target penerimaan PAD yang ditetapkan. Untuk bisa semakin efektif maka pemerintah kabupaten magetan perlu

meningkatkan realisasi penerimaan asli daerah agar tidak cenderung semakin menurun.

2) Rasio efisiensi

Menurut Halim (2002;130), rasio keuangan adalah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Halim (2002;130), dikatakan efisien kinerja dari pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan, jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Jadi semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Hasil dari perhitungan Rasio efisiensi dari tahun 2002, 2003, dan 2004, pada pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan adanya kecenderungan semakin efisien. Hal itu terlihat pada tahun 2002 sebesar 0,11 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 pemerintah kabupaten magetan dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien atau memiliki kinerja yang baik. Karena hasil yang didapat kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100%. Tahun 2003 sebesar 0,12 menunjukkan bahwa pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 0,01, kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD. Namun masih dikatakan efektif dalam melakukan pemungutan pendapatan, karena masih kurang 1 (satu) atau kurang dari 100%.

Dan pada tahun 2004 sebesar 0,08 menunjukkan bahwa adanya penurunan pada tahun 2004 ini sebesar 0,04. indikasi kenaikan dipengaruhi oleh besarnya penerimaan pendapatan asli daerah. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magetan dalam melakukan pemungutan pendapatan semakin efisien. Karena menunjukkan semakin kecil dibawah 1 (satu) atau dibawah 100%.

Jadi pemerintah Kabupaten Magetan dalam melakukan pemungutan pendapatan dari tahun 2002 sampai 2004 menunjukkan semakin efisien walaupun terjadi kenaikan pada tahun 2003 tetapi kenaikan yang terjadi tidak lebih dari 1 (satu) atau diatas 100%.

Namun kelemahan dari efisiensi ini adalah bila dalam menghitung tidak cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seiuruh pendapatan yang diterimanya, inaka meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimannya.

c. Rasio Aktivitas

Untuk melihat bagaimana pemerintah daerah dalam mengalokasikan dananya bisa menggunakan dua Rasio yaitu rasio keserasian dan penyerapan dana per triwulan.

1) Rasio keserasian.

Menurut Halim (2002;131), keserasian maksudnya bagaimana daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Karena belum adanya patokan yang pasti berapa besar alokasi untuk belanja rutin dan berapa besar untuk alokasi belanja pembangunan, maka jika semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan semakin kecil.

Hasil dari perhitungan rasio keserasian pada Pemerintah Kabupaten Magetan, pada belanja rutin menunjukkan adanya kecenderungan naik sedangkan untuk belanja pembangunan menunjukkan adanya kecenderungan menurun. Terlihat pada tahun 2002 untuk belanja rutin sebesar 70,71% dan belanja pembangunan sebesar 19,32%. Menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2002 dalam mengalokasikan dananya memprioritaskan pada belanja rutin.

Tahun 2003 untuk belanja rutin sebesar 74,69% dan untuk belanja pembangunan sebesar 23,60%. Menggambarkan bahwa pada tahun 2003 mengalami kenaikan pada belanja rutin sebesar 3,98% dan pada belanja pembangunan mengalami kenaikan sebesar 4,28%, indikasi kenaikan yang terjadi pada belanja pembangunan dipengaruhi oleh bertambahnya total belanja pembangunan. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah

Kabupaten Magetan dalam mengalokasikan dananya masih difokuskan pada belanja rutin, walaupun terjadi kenaikan pada belanja pembangunan tetapi tidak sampai 40%.

Dan pada tahun 2004 untuk belanja rutin sebesar 76,89% dan belanja pembangunan sebesar 16,43%. Menggambarkan bahwa pada tahun 2004 mengalami kenaikan pada belanja rutin sebesar 2,20% dan penurunan pada belanja pembangunan sebesar 7,17%, indikasi penurunan yang terjadi pada belanja pembangunan kecilnya total belanja pembangunan dan besarnya total APBD. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2004 dalam mengalokasikan dananya adanya kecenderungan untuk semakin memprioritaskan pada belanja rutin sedangkan untuk belanja pembangunan adanya kecenderungan untuk semakin turun.

Jadi pemerintah Kabupaten Magetan dalam mengalokasikan dananya dari tahun 2002 sampai 2004 masih diprioritaskan pada belanja rutin. Padahal sebagai daerah yang berada di Negara berkembang, peranan daerah untuk memicu pelaksanaan pembangunan masih relatif tinggi.

Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Magetan perlu meningkatkan alokasi pendapatannya untuk belanja pembangunan dengan disesuaikan kebutuhan pembangunan di daerah. Karena pembangunan merupakan

salah sarana untuk bisa semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Penyerapan dana pertriwulan,

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 105 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD. Laporan triwulan ini menggambarkan kemampuan Daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara periodik atas kegiatan yang direncanakan pada masing-masing triwulan. Dikatakan efektif bila penyerapan dana untuk pengeluaran terbesar terjadi pada periode triwulan pertama dan tidak adanya surplus dan deficit pada tiap triwulannya.

Dalam analisis ini, karena keterbatasan data yang diperoleh, peneliti hanya bisa mendapat data untuk tahun 2004, selingga untuk tahun 2002 dan 2003 tidak bisa dianalisis. Untuk itu penelitian ini hanya menganalisis laporan penyerapan dana pertriwulan untuk tahun 2004. Dan untuk tahun 2002 dan tahun 2003, diharapkan setidaknya analisis untuk tahun 2004 sudah mewakilinya.

Dari laporan realisasi penyerapan dana pertriwulan ditahun 2004, menunjukan masih adanya kinerja yang kurang efektif. Hal itu terlihat pada triwulan pertama, ternyata dana yang dialokasikan untuk pengeluaran pada triwulan pertama lebih dari 10% (sepuluh persen) dari

pendapatan selama satu tahun. Hal itu ditunjukkan pada realisasi pendapatan sebesar 28,38% dan pada realisasi pengeluaran sebesar 57,32%, yang seharusnya sebagai biaya persiapan dan pelaksanaan *survey design* pada triwulan pertama sebesar 5% sampai 10%. Pada Triwulan kedua terlihat alokasi dana untuk realisasi pendapatan dan realisasi pengeluaran terbesar pada triwulan kedua ini, hal itu ditunjukkan untuk realisasi pendapatan sebesar 57,13% dan untuk realisasi pengeluaran sebesar 107,43%, tetapi menunjukkan pada triwulan kedua ini adanya defisit sebesar 50,30%, karena kecilnya alokasi untuk realisasi pendapatan dan besarnya alokasi untuk realisasi pengeluaran.

Pada triwulan ketiga menunjukkan untuk realisasi pendapatan sebesar 25,70% dan untuk realisasi pengeluaran sebesar 37,71%, pada triwulan ketiga ini juga menunjukkan adanya defisit sebesar 11,99%, karena besarnya realisasi pada pengeluaran sedangkan realisasi pada pendapatan kecil. Dan pada triwulan terakhir menunjukkan untuk realisasi pendapatan sebesar 21,32% dan untuk realisasi pengeluaran sebesar 47,35%, pada triwulan keempat ini, juga adanya defisit, karena besarnya realisasi pada pengeluaran dan kecilnya realisasi pada pendapatan.

Indikasi defisitnya setiap triwulan pada pemerintah Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh realisasi pengeluaran yang tidak disesuaikan dengan besarnya realisasi pendapatan sehingga pengeluaran yang semakin membengkak pertriwulannya akibatnya realisasi pendapatan untuk triwulan selanjutnya digunakan untuk menutupi kekurangan pada triwulan yang sebelumnya.

Hal yang sama ketika dilihat pada realisasi pembangunan, dimana ditriwulan keempat menunjukkan semakin besar yaitu sebesar 24,22% bila dibandingkan dengan triwulan ketiga sebesar 17,87%, padahal untuk triwulan keempat merupakan tahap finishing yang seharusnya semakin kecil.

Jadi penyerapan dana pertriwulan pada pemerintah Kabupaten Magetan untuk tahun 2004 menunjukkan adanya kecenderungan belum efektif. Karena ketika realisasi pendapatan pertriwulan dikurangi realisasi pengeluaran pertriwulan adanya cenderung untuk defisit. Karena adanya realisasi pengeluaran yang besar dan kecilnya realisasi pendapatan pada setiap triwulannya, sehingga realisasi pendapatan untuk setiap triwulannya selalu mengalami kekurangan.

Hendaknya pemerintah Kabupaten Magetan untuk realisasi pengeluaran menyesuaikan dengan realisasi pendapatannya yang ada pada setiap triwulannya, agar tidak terjadi defisit yang lebih banyak lagi.

d. DSCR (debt Service Coverage Ratio)

Menurut Halim, (2002;133), DSCR merupakan batas kemampuan pelunasan hutang yang pada prinsipnya digunakan pemerintah daerah untuk mengendalikan jumlah pinjaman yang relatif aman dan sebagai angka perbandingan antara perkiraan kemampuan keuangan daerah yang dapat disisihkan dengan total rencana pembayaran pinjaman setiap tahunnya.

Hal itu dilakukan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, sebagai salah satu alternatif sumber dana lain selain pendapatan asli daerah. Dengan persyaratan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibaya (PPWD = Pokok Pinjaman Wajib Dibayar) tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari Jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.
- 2) Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5.

Dari perhitungan DSCR menunjukkan untuk tahun 2002 sebesar 20,36%. hal itu menunjukkan bahwa pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Magetan bisa melakukan pinjaman karena DSCR yang dimiliki lebih dari 2,5. Dengan batas maksimal dari pinjaman sebesar 686.374.657,65 dan angsuran pinjamannya sebesar 121.488.314,20. Tahun 2003 sebesar 13,17 %, hal itu menunjukkan jumlah yang menurun, namun masih diatas 2,5 jadi pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2003 bisa melakukan pinjaman. Dengan batas maksimal pinjaman sebesar 646.035.817,43 dan angsuran pinjamannya sebesar 114.348.339,70.

Dan pada tahun 2004 sebesar 25,83%, hal itu menunjukkan kecenderungan jumlah yang naik sehingga pemerintah Kabupaten Magetan bisa melakukan pinjaman yang semakin besar. Dengan batas maksimal pinjaman sebesar 799.966.027,06 dan angsuran pinjamannya sebesar 141.159.398,80.

Jadi pemerintah Kabupaten Magetan dari tahun 2002 sampai tahun 2003 bisa melakukan pinjaman sebagai sumber dana lain untuk melaksanakan pembangunan. Karena telah memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah yaitu jumlah pinjaman komulatif yang wajib dibayar maksimal 75 persen dari penerimaan APBD dan DSCR minimal 2,5.

e. Rasio Pertumbuhan

Menurut Halim (2002;135), rasio pertumbuhan untuk mengukur kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan dari tahun 2002, 2003 dan 2004 pada pemerintah Kabupaten Magetan menunjukkan adanya kecenderungan menurun . Terlihat pada pertumbuhan PAD ditahun 2003 sebesar 28,90% dan ditahun 2004 menjadi (6,29%), hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD ditahun 2003 sebesar 28,90%, indikasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD ditahun 2003 masih dikatakan baik, karena ditahun 2003 masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih relatif besar. Namun ditahun 2004 pertumbuhannya menjadi (6,29%), indikasi turunnya pertumbuhan PAD ditahun 2004, dipengaruhi oleh semakin kecilnya masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Pada pertumbuhan total pendapatan ditahun 2003 sebesar 19,16% dan ditahun 2004 menjadi (3,35%), hal itu menunjukan pertumbuhan total pendapatan ditahun 2003 sebesar 19,16%, indikasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan total pendapatan ditahun 2003 masih dikatakan

baik, karena ditahun 2003, masih besarnya jumlah penerimaan PAD. Namun ditahun 2004 pertumbuhannya menjadi (3,35%), indikasi turunnya pertumbuhan total pendapatan ditahun 2004, dipengaruhi oleh menurunnya jumlah penerimaan pada PAD.

Pada pertumbuhan belanja rutin ditahun 2003 sebesar 19,98% dan ditahun 2004 menjadi 2,30%. Hal itu menunjukkan pada pertumbuhan belanja rutin ditahun 2003 sebesar 19,98%, indikasi tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan belanja rutin ditahun 2003 masih dikatakan baik, karena masih besarnya pengeluaran yang digunakan untuk belanja rutin. Namun ditahun 2004 pertumbuhannya menjadi 2,30%, indikasi turunnya pertumbuhan belanja rutin ditahun 2004, dipengaruhi oleh kecilnya kenaikan jumlah belanja rutin ditahun 2004, bila dibandingkan dengan kenaikan yang terjadi ditahun 2003.

Dan pada pertumbuhan belanja pembangunan ditahun 2003 sebesar 38,73% dan ditahun 2004 menjadi (46,74%). Hal itu menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pembangunan ditahun 2003 sebesar 38,73%, indikasi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja pembangunan ditahun 2003 masih dikatakan baik, karena pengeluaran untuk belanja pembangunan masih relatif besar. Namun ditahun 2004 pertumbuhannya menjadi (46,74%), indikasi turunnya pertumbuhan belanja pembangunan ditahun 2004, dipengaruhi oleh besarnya dana yang dialokasikan untuk belanja rutin.

Jadi pertumbuhan pemerintah Kabupaten Magetan dari tahun 2002, 2003, dan 2004 mengalami penurunan bahkan cenderung untuk negatif di pertumbuhan PAD, Total pendapatan dan belanja pembangunan. Hal itu disebabkan turunnya masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, menurunnya jumlah penerimaan PAD, dan alokasi dana yang diprioritaskan pada belanja rutin, yang menyebabkan adanya penurunan yang sangat dratis pada komponen belanja pembangunan.

3. Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Magetan

--Dari analisis dan perhitungan yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Magetan dengan menggunakan rasio keuangan dapat diketahui kinerja keuangannya setelah ditetapkannya UU otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

Dari analisis rasio kemandirian diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2002 dan 2003 dikatakan mandiri, karena dari hasil perhitungan yang dilakukan menunjukkan diatas 100% yaitu 178,09% dan 102,40%. Namun Kemandirian yang dimiliki adanya kecenderungan untuk menurun, hal itu ditunjukkan ditahun 2004 yang turun dibawah 100% yaitu 64,82%, berarti bahwa pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2004 dikatakan tidak mandiri, hal itu dipicu dengan adanya penurunan pada PAD.

Dari analisis rasio efektifitas menunjukkan bahwa pada pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2002, 2003, dan 2004 dikatakan memiliki kinerja yang efektif, karena hasil yang ditunjukkan dari perhitungan yang dilakukan diatas 100% yaitu 1,10, 1,08 dan 1,07. Namun terlihat adanya kecenderungan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal itu dipicu dengan bertambah besarnya target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riilnya sedangkan pada realisasinya penerimaan PADnya relatif kecil.

Dari analisis rasio efisiensi menunjukan bahwa pada pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2002, 2003, dan 2004 dikatakan dalam melakukan memungut penerimaan dikatakan efisien, karena dari hasil perhitungan yang dilakukan menunjukan dibawah 100% yaitu 0,11, 1,12 dan 0,08. Walaupun terlihat adanya kenaikan yang terjadi ditahun 2003 sebesar 0,01, namun kenaikan yang terjadi tidak lebih dari 100% jadi ditahun 2003 masih dikatakan efisien. Hal itu dipicu dengan besarnya realisasi penerimaan PAD.

Dari analisis rasio keserasian menunjukkan bahwa pada pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2002, 2003, dan 2004 dikatakan dalam memicu pelaksanaan pembangunan masih relatif kecil. Hal itu ditunjukkan adanya 74% dananya dialokasikan untuk belanja rutin yaitu 70,71%, 74,69%, dan 76,89% bahkan adanya kecenderungan untuk naik.

Dan 19,78% dananya dialokasikan untuk belanja pembangunan 19,32%, 23,60%, dan 16.43% bahkan adanya kecenderungan untuk menurun.

Dari analisis penyerapan dana pertriwulan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2004 dikatakan belum merata/efektif dalam mengalokasikan dananya.pada tiap triwulannya. Hal itu terlihat pada triwulan I adanya alokasi dana yang masih lebih 10%, ketika realisasi penerimaan pada tiap triwulannya dikurangi realisasi pengeluaran tiap triwulannya terjadi surplus dan terlihat pula pada triwulan terakhir alokasi dananya masih relatif besar padahal sebagai tahap *finishing* yang membutuhkan dana yang relatif kecil.

Dari analisis DSCR menunjukkan bahwa pada pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2002, 2003, dan 2004 dikatakan mampu untuk mengembalikan hutangnya atau melunasi hutangnya. Hal itu ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan diatas 2,5 yaitu 20,36, 13,17, dan 25,83. Walaupun sempat adanya penurunan ditahun 2003 karena adanya kenaikan total pokok angsuran, bunga, dan biaya pinjaman.

Dari analisis rasio pertumbuhan menunjukkan bahwa pada pemerintah Kabupaten Magetan di tahun 2002, 2003 dan 2004 adanya pertumbuhan yang lamban dalam meningkatkan keberhasilan yang dicapainya. Hal itu ditunjukkan dari perhitungan yang menunjukkan hasil yang negatif pada komponen PAD, pendapatan, belanja pembangunan.

4. Ditinjau dari sudut pandang Islam

Dengan adanya otonomi daerah berarti bahwa pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyeleggarakan pemerintahannya yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama dan bidang lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal itu berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola industri-industri daerah, sumber daya alam, sumber daya manusia, agar bisa melakukan kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu merupakan konsekuensi pemerintah daerah yang telah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola pemerintahannya sendiri.

Sebagaimana dalam islam bahwa pemerintah itu memiliki tugas yang sangat penting, diantaranya adalah *Al-ahkan as-sulthaniyyah* (Regulasi pemerintah), *Maqashid asy-syariah* (kebijakan syariah) dan *Al-hisbah* (umar, 2000;287).

Dikatakan seperti itu, karena pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dalam hal ini masyarakat, dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara perekonomian pada rel yang benar, dan mencegah pengalihan arahnya oleh kelompok berkuasa yang berkepentingan.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl : 125

sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (النحل: ١٢٥).

Artinya:

"Seluruh (manusia) kepada jalan Tuhan-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengatakan orang-orang yang mendapat petunjuk"

Dari ayat diatas menegaskan bahwa Rasul diutus kepada mereka untuk menyeru mereka kepada syariat yang telah digariskan Allah bagi makhluk-Nya melalui wahyu yang diberikan kepadamu, dan memberi mereka pelajaran dan peringatan yang diletakkan didalam kitab-Nya sebagai hujjah atas mereka serta selalu diingatkan kepada mereka. Dan bantahlah mereka dengan bantahan yang lebih baik dari pada bantahan lainnya seperti memberi maaf kepada mereka jika mereka mengotori kehormatanmu, serta bersikaplah lemah lembut terhadap mereka dengan menyampaikan kata-kata yang baik.

Hal itu berkaitan dengan pemerintah kenapa harus berjalan sesuai rel, karena untuk menghindari kesewenangan dalam mengambil keputusan pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan prioritas. Maka dari itu dalam islam adanya prinsip-prinsip yang

dipengaruhi oleh *Maqashid*. Dimana ada enam prinsip yaitu (Umar, 1999;311) sebagai berikut:

- 1) Kriteria utama untuk seluruh alokasi pengeluaran harus dari kesejahteraan rakyat .
- 2) Penghapusan kesulitan dan penderitaan harus lebih diutamakan daripada mengejar kesenangan.
- 3) Kepentingan umum yang mayoritas harus lebih diutamakan daripada kepentingan segolongan kecil yang minoritas.
- 4) Suatu pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian umum dan suatu bahaya yang lebih besar dapat dihindari dengan menempuh bahaya yang lebih kecil.
- 5) Barangsiapa menerima keuntungan harus menanggung biayanya.
- 6) Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan adalah juga wajib.

Dan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya pemerintah bisa memanfaatkan hak yang telah diberikan pemerintah pusat untuk mengelola industri-industri daerah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Al-Hijr : 19-20 yaitu sebagai berikut:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (الحجر: ١٩).

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (الحجر: ٢٠).

Artinya:

" Tujuan Allah menciptakan bumi ialah untuk diberikan kepada manusia agar dapat mempergunakan sumber-sumber yang ada di bumi untuk memperoleh rizki"

Dari ayat diatas terdapat isyarat bahwa Allah memberikan rizki kepada mereka bukan mereka yang memberi rizki itu. Disini benar-benar terdapat pemberian dan karunia yang besar serta rahmat yang lurus bagi para hamba-Nya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis dari penelitian serta dari proses data yang akurat maka kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada rasio kemandirian, Pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2002, dan 2003 masih dikatakan mandiri, karena berada diatas 100%. Namun di tahun 2004 tidak bisa lagi dikatakan mandiri karena hasilnya dibawah 100%.

Rasio efektifitas pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2002, 2003 dan 2004 dikatakan memiliki kinerja yang efektif karena memiliki hasil diatas 100% atau 1 (satu).

Rasio efisiensi pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2002, 2003, dan 2004 dikatakan dalam memungut penerimaan pendapatan telah efisien karena memiliki hasil dibawah 100% atau 1 (satu).

Rasio keserasian pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2002, 2003, dan 2004 dalam mengalokasikan dananya 74% masih diprioritaskan pada belanja rutin, jadi untuk memicu pelaksanaan pembangunan relative kecil.

Penyerapan dana pertriwulan, pemerintah Kabupaten Magetan ditahun 2004 dalam mengalokasikan dananya pada tiap triwulannya belum merata/efektif karena untuk alokasi dana pada triwulan I masih diatas 10%, ketika realisasi penerimaan tiap triwulan dikuangi realisasi pengeluaran tiap triwulan adanya defisit dan pada triwulan terakhir sebagai tahap *finishing* dana yang dialokasikan masih relatif besar.

DSCR Pemerintah Kabupaten Magetan dari tahun 2002,2003 dan 2004, menunjukan adanya kemampuan untuk mengembalikan hutangnya atau melunasi hutangnya karena masih diatas 2,5.

Rasio pertumbuhan pemerintah Kabupaten Magetan dari tahun 2002, 2003,dan 2004 masih dikatakan lamban dalam meningkatkan keberhasilan yang telah dicapainya karena adanya hasil yang negative pada Komponen PAD, pendapatan, dan belanja pembangunan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Magetan maka peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten Magetan hendaknya mengurangi ketergantungannya terhadap pihak ekstern, dengan pengoptimalan sumber sumber pendapatan yang telah ada, maupun dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber

pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikuasai pusat atau propinsi.

2. Pemerintah Kabupaten Magetan perlu meningkatkan untuk alokasi pendapatannya untuk belanja pembangunan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan yang ada di Kabupaten Magetan.
3. Hendaknya Pemerintah Kabupaten Magetan untuk realisasi pengeluaran menyesuaikan dengan realisasi pendapatannya yang ada pada setiap triwulannya, agar tidak terjadi defisit yang lebih banyak lagi
4. Hendaknya pemerintah Kabupaten Magetan perlu memperhatikan pertumbuhan pada komponen yang memiliki pertumbuhan negatif yaitu PAD, total pendapatan dan belanja pembangunan. Tetapi yang lebih harus diperhatikan adalah pada pertumbuhan belanja pembangunan, karena komponen ini merupakan sarana pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanannya pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar dan Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. PT Renika Cipta. Jakarta.
- _____. 2002. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Pratek*. Aneka cipta. Jakarta.
- _____. 1991. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. PT. Melton putra. Jakarta.
- Baridwan, Zaki. 1996. *Intermeddieate Accunting*. BPFE. Yogyakarta.
- Bastian, Indra dan Soepriyanto, Gatot. 2003. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba empat. Jakarta.
- Chapra, Umar. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Pres. Jakarta
- _____. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gema Insani.press. Jakarta.
- Fitria, Eka diana. 2004. Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan rokok (studi pada Gudang Garam, tbk dan PT. Hanjaya Mandala, tbk)
- Rohana, Eni. 2004. Analisis rasio keuangan Bank dengan metode CAMEL untuk mengetahui kinerja PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Salemba empat. Jakarta.
- _____. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. Unit penerbit dan percetakan (UPP) AMP YKPN. Yogyakarta.
- Harahap, Shofyan. Syafri. 2001. *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. PT raja grafindo persada. Jakarta.
- Husein Syahatah. 2001. *Akuntansi Islam*. Media eka sarana. Jakarta.

- Mannan, M.A. 1992. *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. PT. Intermasa. Jakarta.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba empat. Jakarta
- Munawir. 1999. *Analisa Laporan Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI. Yogyakarta.
- Nugroho, Rian. 2000. *Desentralisasi Tanpa Revolusi*. PT Elex Media Komputerindo kelompok Gramidia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomer 105 Tahun 2000. Tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia. Nomer- 107 Tahun 2000. Tentang pinjaman daerah.
- Rohana, Eni. 2004. Analisis rasio keuangan Bank dengan metode CAMEL untuk mengetahui kinerja PT Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.
- Riyanto,Bambang. 1992. *Dasar-dasar Pembeianjaan Perusahaan*. Yayasan badan penerbit gajah mada. Yogyakarta.
- Soediyono, R. 1991. *Analisa Laporan Kauangan*. Liberty. Ygyakarta.
- Syahrul dan Nizar, Afdi Muh. 2000. *Kamus Akuntansi*. Citra harta priam. Jakarta.
- Syaukani, Afan Gaffer dan Rasyid Riyas. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Pustaka pelajar. Yogyakarta.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. UMM press. Malang.
- Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Bisnis*. PT. Gramedia pustaka utama. Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia: ~~Nomer~~ 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 1999. Tentang
Perimbangan keuangan antara daerah pusat dengan
pemerintahan daerah.

Widodo, Hertanto. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tanwih
(BMT)*. Mizan. Bandung